

PERANAN KERJASAMA INDONESIA – KOREA SELATAN BAGI
PEMBANGUNAN INDUSTRI PERTAHANAN DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi salah satu syarat
Dalam Menempuh Ujian Sarjana Program Strata Satu
Pada Jurusan Hubungan Internasional
Tahun Akademik 2017/2018

Disusun Oleh :

Nahdah Ayu Utami

152030094



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS PASUNDAN

BANDUNG

2018

LEMBAR PENGESAHAN

**PERANAN KERJASAMA INDONESIA-KOREA SELATAN BAGI
PEMBANGUNAN INDUSTRI PERTANIAN DI INDONESIA**

Oleh :

Nahdah Ayu Utami

NRP. 152030094

Telah Diujikan pada Tanggal

.....
**Menyetujui,
Pembimbing**

Drs. Aswan Haryadi

NIDN 0015105601

Mengetahui,

**Dekan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Ketua,
Jurusan Hubungan Internasional**

Dr. M.Budiana, S.IP., M.Si.
NIDN. 0402047002



Dr.Ade Priangani, M.Si.
NIDN. 0411066901

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar benar hasil penelitian saya sendiri. Adapun semua referensi/ kutipan (baik kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung) dari hasil karya ilmiah orang lain tiap-tiap kutipan, telah saya sebutkan sumbernya sesuai etika ilmiah. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti hasil meniru/plagiat dan terbukti mencantumkan kutipan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, saya bersedia menerima sanksi penangguhan gelar kesarjanaan dan menerima sanksi dari lembaga yang berwenang.

Bandung, 04 Maret 2019

Nahdah Ayu Utami
152030094

HALAMAN PENGHARGAAN/MOTTO DAN DEDIKASI

**Jangan pernah berhenti berusaha mewujudkan apa yang diinginkan
dan diimpikan !**

Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia !!

**“Tidak ada yang dapat menolak TAKDIR kecuali DOA”
(HR. Ahmad, At-tirmidzi dan Ibnu Majah)**

**Kupersembahkan untuk...
Kedua Orang Tuaku
Ibu dan ayahku
Serta Kakaku
Dan adekku Tercinta**

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Nahdah Ayu Utami
TTL : Sukabumi, 08 November 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Penyu No 10A, Turangga Bandung.
Status : Belum menikah
Email : utamia75@gmail.com
No. handphone : 081910964365

DATA PENDIDIKAN

SD : SDN Dewi Sartika CBM Kota Sukabumi
SMP : SMP Islam Al Azhar 7
SMA : SMAN 3 Kota Sukabumi
Perguruan : Universitas Pasundan Bandung, Jurusan Ilmu
Tinggi Hubungan Internasional 2015

ORGANISASI

- Paguyuban Mojang Jajaka Kota Sukabumi
- Paguyuban Duta Kampus UNPAS
- Paguyuban Pasundan
- Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional
- BEM FISIP UNPAS

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb., Alhamdulillahirobil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat, nikmat dan hidayahnya penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi yang berjudul **“Peranan Kerjasama Indonesia dan Korea Selatan bagi Pembangunan industri Pertahanan di Indonesia ”** ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Program Strata-1 (S1).

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, masih banyak kekurangan mengingat kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Akan tetapi penulis telah mengerahkan semua kemampuan dalam menyusun skripsi ini dengan sebaik mungkin.

Penyusunan skripsi ini tidaklah mudah, berbagai kendala penulis temui. Namun berkat doa, dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak , penulis dapat melewati hambatan tersebut. Untuk itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf, S.p., M.Si, M.Kom., selaku Rektor Universitas Pasundan dan segenap jajarannya.
2. M.Budiana, S.IP., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Pasundan beserta jajarannya.
3. Dr. Heri Herlangga,S. Sos., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Pasundan.
4. Dr. Sutrisno, S.Sos., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Pasundan

5. Drs. H. R. Sumardhani, M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Pasundan
6. Drs. Ade Priangani, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Pasundan
7. Dosen Pembimbing, Drs. H. Aswan Haryadi, M.Si. atas saran dan dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terimakasih banyak Pak atas bimbingan dan waktunya, tanpa bimbingan bapak, skripsi saya tidak bisa selesai dengan baik.
8. Seluruh Karyawan Humas Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Pasundan
9. Orangtua saya yang telah mendukung secara emosional dan materiil, serta atas doa yang tiada henti-hentinya dipanjatkan setiap hari. Terimakasih ayah ibu atas apa yang telah kalian berikan sampai saat ini sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Nenek Kakek saya yang sangat saya cintai juga selalu mendoakan dan mendukung sehingga saya bisa tepat waktu menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk adik-adikku Adam dan Aira, yang selalu memberikan semangat. Semoga suatu hari kalian bisa lebih dari saya untuk mencapai kesuksesan.
12. Untuk teman-teman Duta Kampus Universitas Pasundan terimakasih untuk dukungan, motivasi, dan kebersamaannya

semenjak kita menjadi Duta Kampus UNPAS hingga saat ini .
Semoga kelak kita tidak saling melupakan and see you on top guys.

13. Untuk teman-teman HI C dan B 2015 terimakasih atas segala bantuan dan kebersamaannya selama saya kuliah.

Dan untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada Bapak Drs. Aswan Haryadi M.Si selaku pembimbing. Dan kepada kedua orang tua serta rekan dan kerabat yang senantiasa memberikan dukungan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlimpah kepada semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran tugas ini. Kebenaran hanya milik Allah dan kelalaian mungkin terjadi pada diri peneliti, karena itu peneliti menerima dengan terbuka kritik serta saran demi kesempurnaan tugas ini. Semoga tugas ini dapat memberikan manfaat, sekecil apapun. Amin.

Bandung,08 November 2018

Nahdah Ayu Utami

152030094

ABSTRAK

Kondisi militer Indonesia saat ini bila di bandingkan dengan negara lain masih tertinggal, dalam hal ini Pemerintah mempunyai peran penting dalam mengatasi masalah yang terjadi. Terkait hal ini tentunya Indonesia harus menjalin kerjasama dengan negara yang lebih maju dan lebih modern dalam bidang pertahanan. Salah satu negara yang bekerjasama dengan Indonesia dalam bidang pertahanan adalah Korea Selatan, Indonesia bekerjasama dengan Korea Selatan karena kekuatan militer Korea Selatan terlihat lebih baik atau lebih modern dari Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi aktivitas program kerjasama pertahanan Indonesia-Korea Selatan terhadap pembangunan industri pertahanan di Indonesia, bagaimana menciptakan kompetensi dalam pembangunan industri pertahanan Indonesia melalui kegiatan kerjasama pertahanan Indonesia-Korea Selatan serta mengetahui mengapa dukungan logistik merupakan prasarat bagi pembangunan industri pertahanan Indonesia.

Jenis metode yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan sebuah metode yang menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat sebuah permasalahan.

Dari penelitian ini bisa disimpulkan bahwa dalam modernisasi pembangunan sistem pertahanan, Indonesia juga melakukan alih teknologi atau TOT (Transfer of Technology) dengan industri pertahanan negara lain yang bekerjasama dalam bidang pertahanan dengan Indonesia.

***Kata Kunci : Kerjasama Pertahanan Indonesia-Korea Selatan
Pembangunan Industri Pertahanan Indonesia***

ABSTRACT

The current condition of the Indonesian military if compared to other countries is still falling behind, in this case the Government has an important role in overcoming the problems that occur. In this case of course Indonesia should be establish cooperation with more advanced and more modern state in the field of defense. One of the countries working with Indonesia on defense is South of Korea. Indonesia works with South Korea because South Korea forces look better or more modern than Indonesia.

The objective of this research is to define the implementation of Indonesia-South Korea defense cooperation program activity toward defense industry development in Indonesia, how to create competence in Indonesia defense industry development through Indonesia defense cooperation activity of South Korea and also to know why logistic support is to be a prerequisite for development of Indonesia defense industry. Type of method used by writer in this research is qualitative method. Qualitative method is a method that emphasizes the aspect of deeper understanding of a problem than to see a problem.

From this research, it can be concluded that the Indonesian government allocates big budget to improve alutsista, Indonesia also develop way by way of transfer of technology or TOT with defense industry of other country which cooperate in defense field with Indonesia. Through this partnership, Indonesia has many advantages such as Indonesia getting military training, technology development through TOT program and obtaining alutsista purchase license from South Korea.

Keywords : ***Indonesia-South Korea Defence Cooperation, Defence Industry Development Indonesia***

RINGKESAN

Kaayaan militer Indonesia nalika dibandingkeun jeung nagara lian masih katinggaleun, dina hal ieu pamarentah boga peran penting dina alamat masalah anu lumangsung. Patali jeung ieu, tangtu, Indonesia ges ngadeg migawe bareng kalayan nagara beuki maju jeung leuwih modern dina widang pertahanan. Salah sahiji nagara anu gawe bareng kalawan Indonesia dina widang pertahanan nyaeta Korea Selatan. Indonesia migawe bareng bareng kalayan Korea selatan kusabab kakuatan militer Korea Selatan leuwih hade atawa leuwih modern ti Indonesia.

Panalungtikan ieu boga tujuan pikeun minyaho palaksanaan kagiatan program gawe bareng widang pertahanan Indonesia-Korea Selatan pikeun pambangunan industri pertahanan di Indonesia, kumaha carana nyiuen kompetensi dina pambangunan industri pertahanan Indonesia ngaliwatan kagiatan gawe babarengan pertahanan Indonesia-Korea Selatan sarta uninga alesan bantuan logistik mangrupikeun prasarat pikeun pambangunan industri pertahanan Indonesia.

Jenis metode anu digunakeun pangarang dina ieu skripsi nyaeta metode kualitatif. Metode kualitatif mangrupikeun metode nu nekenkeun aspek pamahaman anu leuwih jero tina sahiji masalah ti ningali sahiji parmasalahan.

Tina panalungtikan ieu bisa disimpulkeun yen pamarentah indonesia pikeun ngaalokasikeun anggaran anu ageung pikeun ngaronjatkeun alutsista, Indonesia oge ngalakukeun pangwangunan ku cara make mindahkeun tehnologi, atawa TOT (Transfer of Tehnologi) kalayan industri pertahanan nagara sejen anu migawe bareng dina widang pertahanan jeung Indonesia. Tina gawe babarengan ieu, Indonesia miboga loba kauntungan kayaning Indonesia menang palatihan militer pangwangunan teknologi tina program TOT sarta meunang idin pikeun meuli alutsista ti Korea Selatan.

***Kecap Konci : Gawe Bareng Pertahanan Indonesia-Korea Selatan
Pembangunan Industri Pertahanan Indonesia***

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGHARGAAN/MOTTO DAN DEDIKASI	iv
RIWAYAT HIDUP	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
RINGKESAN	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Penelitian.....	1
2. Identifikasi Masalah.....	10
2.1 Pembatasan Masalah	10
2.2 Rumusan Masalah	10
3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
3.1 Tujuan Penelitian.....	11
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
1. Literatur Review	13
2. Kerangka Teoritis	16

3. Hipotesis Penelitian	23
4. Operasionalisasi Variabel dan Indikator	24
5. Skema Kerangka Teoritis.....	31
BAB III	32
METODE PENELITIAN	32
1. Paradigma Penelitian	32
2. Tingkat Analisis	33
3. Metode Penelitian	34
4. Metode Pengumpulan Data.....	34
4.1 Teknik Pengumpulan Data	34
4.1.1 Data Primer	34
4.1.2 Data Sekunder	35
5. Lokasi penelitian.....	35
6. Jadwal dan kegiatan penelitian	36
7. Sistematika Penulisan	37
BAB IV	38
PEMBAHASAN.....	38
A. Implementasi program kerjasama Korea Selatan-Indonesia bagi pembangunan sistem pertahanan Indonesia	38
1. <i>Transfer Technology</i> Sebagai upaya Peningkatan Pertahanan Indonesia	41

2. Misi Pertukaran Siswa untuk kerjasama pertahanan Indonesia-Korea Selatan	44
3. Dukungan Logistik dalam kerjasama pertahanan Indonesia-Korea Selatan	47
B. Strategi Pembangunan Sistem Pertahanan.....	50
C. Responsibilitas pembangunan Industri Pertahanan di Indonesia.....	52
1. Tantangan Pembangunan Industri Pertahanan di Indonesia.....	65
2. Membudayakan Militer dan Militerisasi Militer	66
3. Proses rekrutmen pembangunan pertahanan di Indonesia	68
D. Reorientasi serta strategi kebijakan pembangunan industri pertahanan di Indonesia.....	71
1. Reorientasi pembangunan industri pertahanan di Indonesia	72
2. Rasionalisasi pembangunan industri pertahanan di Indonesia	76
BAB V	80
PENUTUP	80
1. Kesimpulan	80
2. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Untuk menjaga stabilitas ketahanan negara maka kerjasama di bidang pertahanan menjadi penting. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah suatu negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara¹. Pertahanan negara dilakukan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara. Pertahanan nasional merupakan kekuatan bersama (sipil dan militer) diselenggarakan oleh suatu negara untuk menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan/atau menjaga kepentingan-kepentingannya. Pertahanan nasional dikelola oleh Kementerian Pertahanan.

Sistem pertahanan militer yang kuat dari segi kualitas maupun kuantitas merupakan bagian dari kedaulatan sebuah negara yang tidak bisa dipisahkan. Sistem pertahanan tersebut fungsi utamanya bukanlah melancarkan serangan terbuka, melainkan untuk mempertahankan kedaulatan negara yang bersangkutan, baik melindungi aset geografis yang melingkupi darat, udara, dan laut, dan juga melindungi setiap warga negaranya. Jika dilihat dari tingkat prioritasnya, militer merupakan elemen pemukul yang sangat efektif untuk mempertahankan kedaulatan sebuah negara, tidak peduli negara itu kaya atau miskin sekalipun.

¹ Rahakundini Connie Bakrie (Ed.), "Pertahanan negara dan postur TNI ideal", 2007. Jakarta, Yayasan Obor

Walau sebuah negara tidak mengawali serangan militer, dalam keadaan damai pun kekuatan militer mampu menjadi deterrence factor (faktor penggetar) bagi negara-negara lain. Dengan begitu tidak ada negara yang berani berperang dengan negara tersebut, minimal berpikir berulang kali untuk menjadi lawan dalam peperangan. Akan tetapi, apa jadinya jika sebuah negara tidak memiliki sistem pertahanan atau elemen militer yang kuat untuk melindungi negaranya.

Bangsa Asia mengalami revolusi industri pertahanan pada awal abad ke-19. Salah satu pengalaman sejarah yang sangat berbekas pada kenangan berbagai bangsa di Dunia Ketiga, adalah pengalaman berhadapan di medan pertempuran dengan kekuatan militer negara-negara barat, pertama, ketika negara-negara yang terakhir ini melebarkan sayap kekuasaannya di bawah naungan politik imperialisme pada abad ke-18 dan 19; dan terakhir ketika bangsa-bangsa di Dunia Ketiga mulai bangkit nasionalismenya, dan berusaha melepaskan diri dari belenggu penjajahan, pada periode sesudah berakhirnya Perang Dunia ke II. Berulang kali dibuktikan dan setiap kali dengan pengorbanan yang besar, betapa kekuatan pihak tradisional selalu dikalahkan oleh mereka yg modern.² Konflik-konflik yang terjadi menjadi ajang negara Barat untuk memamerkan dengan jelas bahwa kekalahan itu bukan sekedar terletak pada perbedaan teknologi senjata, tapi juga pada sistem organisasi yang digunakan oleh masing-masing pihak, perbedaan sikap dan cara memandang dalam bidang strategi dan taktik, baik dalam tahapan peperangan maupun diplomasi, dan yang tak pernah meninggalkan kesan yang mengagumkan oleh keampuhan sistem logistik pihak Barat.³ Keangkuhan dan kemampuan pihak penyerang itu terletak pada industri-industri yang secara tekun

² Jakti Dorodjatun Kuntjoro, *Hubungan Sipil-Militer, Sistem Politik dan Sistem Hankam di Dunia Ketiga : Jalan Keluar ataukah Masalah Pokok?*, Jakarta, 1988. LP3ES. halaman 94

³ *Ibid.*

melalui masa pembinaan yang lama didirikan dan di kembangkan menjadi sebuah sistem terpadu berskala besar, yang pada akhirnya menumbuhkan sebuah pola kehidupan bahkan kebudayaan yang baru. Dari konfrontasi yang berat sebelah dan kesadaran inilah kita terpaksa mengakui, secara terus terang atau diam-diam, bahwa: (1) dalam banyak hal, yang moderen lebih kuat dan terasa kehadirannya dibandingkan dengan tradisional; dan (2) jalan keluar bagi Dunia Ketiga adalah lewat industrialisasi, dan lebih hakiki dari itu lewat moderenisasi.⁴

Munculnya Amerika Serikat sebagai kekuatan Barat di kawasan Pasifik, dan masuknya Rusia moderen di daratan Asia Utara dalam bentuk serta cara yang lebih efektif dari periode sebelumnya, bergeraklah fokus ekspansi Barat ke kawasan Cina Utara-Mancuria-Korea-Jepang. Pada waktu itu pemerintah Manchu di Cina praktis telah porak poranda. Dipaksa memberikan macam-macam konsesi kepada berbagai negara Barat, dan membuka lebar daratan Cina untuk perdagangan industri-industri Barat. Proses *demoralisasi* lambat laun terjadi terhadap kerajaan tertua dan terbesar di Asia ini.⁵ Karikatur dari segala apa yang salah dari sebuah pola kehidupan tradisional, dalam menghadapi tantangan negara-negara modern Barat. Wibawa pemerintah pusat Cina dirapuhkan lewat praktek korupsi di antara birokrat kerajaan Cina dengan perusahaan/pedagang Barat, dengan akibat kerajaan dikeringkan dari sumber obyek penghisapan para pendatang. Pihak Barat memperhitungkan skala Cina yang begitu besar untuk mendudukinya sebagai koloni-koloni.⁶

⁴ *Ibid.* hlm.95

⁵ Jakti Dorodjatun Kuntjoro, *RevolusiMeiji: Jawaban Asia yang Pertama*, Jakarta, 1988. LP3ES. Hlm. 95

⁶ John K. Fairbank, Edwin O. Reischauer, dan Albert M. Craig, *East Asia: The Modern Transformation*, Boston: Houghton Mifflin, Co., 1965, khususnya Bab 11 "Invasion and Rebellion in China"

Runtuhnya kekuasaan feodalisme kalangan *samurai* di Jepang merupakan tujuan dari negara-negara Barat dikarenakan Jepang mempraktekan politik *pintu tertutup* bagi dunia Barat. Ekspansi kegiatan ekonomi dan perdagangan barat membawa lebih banyak kapal-kapal dagang yang pada akhirnya memancing banyak insiden dengan Jepang. Hal inilah yang memancing Jepang untuk terlibat konflik bersenjata dengan negara-negara Barat. Namun seperti yang dialami oleh bangsa Asia lainnya yakni betapa sangat tertinggalnya teknologi persenjataan dan organisasi pasukan mereka dibandingkan dengan pihak pendatang. Termasuk disini, yentunya, para *the men behind the gun*, baik dari kalangan perwira maupun prajurit. Seperti terjadi di Cina, hal ini di Jepang menimbulkan gelombang ketidakpuasan dan ketidakpercayaan teradap pemerintah yang berkuasa.⁷

Pada akhir keruntuhan feodalisme di Jepang, dan bangkitnya nasionalisme masyarakat Jepang, dan tantangan yang makin terbuka dari Barat, semua ini mendorong pihak Jepang untuk melakukan langkah drastis dalam kebudayaan mereka, yakni membuka Jepang terhadap berbagai upaya pembaharuan, di bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan dan militer, secara sekaligus dan baik dengan mengirimkan pemuda-pemuda Jepang ke Barat maupun memanfaatkan ahli-ahli Barat di Jepang. Rezim Kaisar Meiji melakukan semua ini, sambil sekaligus menghabisi sistem feodalisme yang militeristis, menuju ke pembinaan aparat militer dan sipil yang tersentralisasi secara nasional.⁸

Di Indonesia sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai “komponen utama” dengan

⁷ Jakti Dorodjatun Kuntjoro, *op cit.*, hlm.97

⁸ Seiichi Tobata, *The Modernization of Japan I*, Tokyo: The Institute of Asian Economic Affairs, 1966.

didukung oleh “komponen cadangan” dan “komponen pendukung”. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah diluar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

Pada tahun 1991 di Dili Timor Timur terjadi kerusuhan dimana pada waktu itu terjadi disintegrasi Timor Timur. Pada akhirnya Indonesia diembargo dalam bidang militernya oleh AS. Stabilitas keamanan di Indonesia memasuki masa sulit ketika terjadi krisis keuangan yang melanda kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia pada 1997/1998. Krisis keuangan berdampak sistemik karena mempengaruhi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial masyarakat Indonesia. Hal itu akhirnya membuat pertahanan negara Indonesia menjadi lemah.

Namun, dibalik peristiwa itu Indonesia tidak pernah putus asa untuk terus mengembangkan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) sehingga pada tahun 2009 diberlakukan Minimum Essential Force (MEF) yang merupakan suatu standar kekuatan pokok dan minimum. Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mutlak disiapkan sebagai prasyarat utama serta mendasar bagi terlaksananya secara efektif tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi ancaman aktual.

Alokasi APBN sampai dengan tahun anggaran (TA) 2007, pertahanan negara memang belum menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. APBN 2008, sektor pertahanan negara masih berada pada prioritas urutan keempat dibawah fungsi pelayanan umum, pendidikan, dan ekonomi. Sasaran pokok yang ingin dicapai pada TA 2008 diarahkan pada kapabilitas pertahanan, peningkatan

jumlah, dan kondisi kesiapan operasional pertahanan, modernisasi alutsista serta teknologi dan industri pertahanan dalam negeri. Pada tahun anggaran 2010, anggaran untuk pertahanan sedikit naik dan menduduki tiga besar, alokasi anggaran untuk mendukung kemampuan kekuatan pertahanan minimum (Minimum Required Essential Forces) MREF.

Prioritas pertama perwujudan MREF adalah peningkatan mobilitas TNI Angkatan Udara (TNI AU), TNI Angkatan Laut (TNI AL), dan TNI Angkatan Darat (TNI AD) untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok TNI diseluruh wilayah nasional. Prioritas MREF selanjutnya adalah pada peningkatan kemampuan satuan tempur, khususnya pasukan pemukul reaksi cepat (striking force) baik satuan ditingkat pusat maupun satuan diwilayah, serta penyiapan pasuka siaga (standby force) terutama untuk penanganan bencana alam serta untuk tugas-tugas misi perdamaian dunia dan keadaan darurat lainnya.⁹ Sedangkan pada tahun 2009 telah dirumuskan Strategic Defense Review (SDR) dan ditetapkan pokok-pokok pikiran serta direkomendasikan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan suatu kekuatan pokok minimum yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertahanan sebagai postur ideal pertahanan negara¹⁰.

MREF dibagi menjadi tiga tahap yang dimulai dari Rencana Strategis (Renstra) tahap I (2010-2014), selanjutnya Renstra Tahap II (2015-2019), dan terakhir Renstra Tahap III (2020-2024). Dalam Renstra pertama, Indonesia telah

⁹ Agus Hartanto, "Kajian kebijakan Alutsista Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia". Jakarta:LIPI Press, 2014 hal 13-14

¹⁰"Berita Negara Republik Indonesia" dalam <http://www.kemhan.go.id/ppid/wpcontent/uploads/sites/2/2016/10/Pemenhan-Nomor-19-2012-1.pdf>.

menjalin kerjasama dibidang pertahanan dengan berbagai negara salah satunya dengan Korea Selatan.

Indonesia dan Korea Selatan secara resmi menjalin hubungan Diplomatik pada 17 September 1973. Menurut jajak pendapat BBC World Service Poll tahun 2014, 48% orang Indonesia menerima pengaruh Korea Selatan dengan positif dan 27% melihatnya dengan negatif¹¹. Korea Selatan melakukan hubungan diplomatik lebih dari 188 negara. Korea Selatan juga tergabung dalam PBB sejak tahun 1991, bersamaan dengan bergabungnya Korea Utara. Pada 1 Januari 2007, Menteri Luar Negeri Korea Selatan pada saat itu, Ban Ki-moon resmi menjadi Sekretaris Jenderal PBB menggantikan Kofi Annan. Selain itu, Korea Selatan juga menjadi mitra strategis ASEAN sebagai anggota Asean Plus 3 dan aktif dalam forum ekonomi dunia lainnya seperti G-20, APEC dan Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur.

Invasi serta ketegangan dengan Korea Utara telah mendorong Korea Selatan mengalokasikan 2.6% dari PDB dan 15% dari pengeluaran pemerintah untuk pembiayaan militer serta mewajibkan seluruh pria untuk mengikuti wajib militer. Jumlah tentara aktif Korea Selatan menempati urutan keenam terbesar di dunia¹², urutan kedua dalam jumlah tentara cadangan dan sebelas besar dalam urusan anggaran pertahanan.

Pasukan militer Korea Selatan terdiri atas Angkatan Darat (ROKA), Angkatan Laut (ROKN) dan Korps marinir (ROKMC)¹³. Angkatan bersenjata ini kebanyakan berkonsentrasi di daerah perbatasan Zona Demiliterisasi Korea.

¹¹ <http://downloads.bbc.co.uk/mediacentre/country-rating-poll.pdf>

¹² http://www.csis.org/media/isis/pubs/060626_asia_balance_powers.pdf

¹³ <http://www.globalsecurity.org/military/world/rok/index.html>

Seluruh pria Korea Selatan diwajibkan secara konstitusi untuk mengikuti wajib militer, umumnya untuk masa dua tahun.

Hubungan baik Indonesia-Korea Selatan telah terbina sejak lama dan semakin hangat saat Presiden Chun Doo Hwan mengunjungi Indonesia pada bulan Juli 1981, dan pada tahun berikutnya Presiden Soeharto mengunjungi Korea Selatan pada bulan Oktober 1982. Pada bulan November 1988 Presiden Roh Tae Woo mengunjungi Indonesia. Presiden Kim Young Sam, mengunjungi Indonesia pada bulan November 1994. Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid mengunjungi Korea Selatan dua kali pada tahun 2000, yakni pada bulan Februari dan Oktober, dan pada tahun yang sama Presiden Kim Dae Jung mengunjungi Indonesia pada bulan November 2000. Presiden Megawati Soekarnoputri mengunjungi Korea Selatan pada bulan Maret 2002.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengunjungi Korea Selatan pada saat APEC Summit di bulan November 2005. Pada Desember 2006, Presiden Roh Moo Hyun mengunjungi Indonesia untuk menandatangani Persekutuan Strategis Bersama antara Indonesia dengan Korea Selatan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengunjungi Korea Selatan sebagai tamu negara pada bulan Maret 2012 dan Presiden Lee Myung-bak pergi ke Indonesia untuk menghadiri Bali Democracy Forum di bulan November 2012.

Di samping banyaknya saling kunjung dari para pejabat tinggi seperti para Menteri, Ketua dan Anggota Parlemen, Dirjen, Direktur dan para pejabat tinggi lainnya termasuk pula rombongan/misi-misi dagang. Saling kunjung ini merupakan salah satu indikator betapa baiknya hubungan kedua negara yang hingga saat ini masih tetap dapat dipelihara dengan baik.

Pertumbuhan perdagangan dan investasi yang cepat membuat kedua pemerintahan menyetujui persekutuan strategis pada tahun 2006. Indonesia dan Korea Selatan berinvestasi dalam berbagai proyek pengembangan militer gabungan, termasuk Jet Tempur KFX/IFX¹⁴. Perusahaan Korea Selatan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) sudah mencapai tahap akhir negosiasi kontrak untuk memasok Indonesia dengan tiga kapal selam Type-209. Ini akan menjadi transaksi pertahanan bilateral terbesar, dengan nilai US\$1,1 milyar.

Indonesia-Korea Selatan telah memutuskan untuk meningkatkan dan memperdalam kerjasama dibidang Pertahanan pada 12 Oktober 2013, lingkup yang berkaitan dengan dialog bilateral rutin dan konsultasi, pertukaran informasi, pertukaran kunjungan antar instansi, kerjasama kedua Angkatan Bersenjata, kerjasama IPTEK, kerjasama dalam keamanan laut.

Kekuatan Militer Korea Selatan berada di posisi ke 12 dalam kekuatan dunia.

Dengan mengkaji, menganalisa serta memperhatikan uraian pada permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti masalah dengan judul :

“PERANAN KERJASAMA INDONESIA – KOREA SELATAN BAGI PEMBANGUNAN INDUSTRI PERTAHANAN DI INDONESIA”

¹⁴ http://news.xinhuanet.com/english2010/world/2011-07/12/c_13980469.htm

2. Identifikasi Masalah

Dari uraian diatas, untuk memudahkan penulis dalam menganalisa masalah, maka disusunlah identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Sejauh mana implementasi program kerjasama Korea Selatan-Indonesia bagi pembangunan sistem pertahanan Indonesia?
2. Bagaimana strategi pembangunan sistem pertahanan?
3. Bagaimana kebijakan pembangunan industri pertahanan di Indonesia?
4. Bagaimana reorientasi serta strategi kebijakan pembangunan industri sistem pertahanan Indonesia?

2.1 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu sejauh mana implementasi program kerjasama Korea Selatan-Indonesia bagi pembangunan sistem pertahanan di Indonesia dibatasi pada orientasi strategi pembangunan.

2.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah di ajukan dengan tujuan untuk memudahkan penulis dalam menganalisa mengenai permasalahan yang di dasarkan pada identifikasi masalah, maka penulis akan menarik *research question* dari permasalahan tersebut, yaitu :**“Sejauh mana re-orientasi strategi**

kebijakan pembangunan industri sistem pertahanan korelasinya dengan implementasi program kerjasama Indonesia-Korea Selatan?” .

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

3.1 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentu mempunyai tujuan tertentu berdasarkan pada kepentingan serta motif-motif individual maupun kolektif. Tujuan penelitian berkaitan dengan penelaahan, pemahaman serta pengembangan bidang yang sedang diteliti. Dengan demikian tujuan merupakan aplikasi bagi dilaksanakannya suatu penelitian. Adapun tujuan penulis melakukan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pembangunan industri pertahanan negara
- b. Untuk mengetahui bagaimana hubungan diplomasi Korea Selatan dan Indonesia
- c. Untuk mengetahui mengapa dukungan logistik merupakan prasarat bagi pembangunan industri pertahanan Indonesia

Adapaun kegunaan penelitian ini antara lain :

- a. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dalam masalah yang ditelaah, melatih ketajaman berfikir sehingga mendukung dalam rangka mempersiapkan diri untuk menjadi seorang intelektual sekaligus untuk memenuhi syarat skripsi Profesi Hubungan Internasional, Program Strata-1, tahun akademik 2018-2019.

- b. Bagi institusi, Universitas Pasundan, karya tulis ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan untuk memperkaya khasanah literatur studi Hubungan Internasional.
- c. Sebagai referensi tambahan bagi pengembangan studi Hubungan Internasional secara khusus, yaitu sebagai landasan studi berikutnya mengenai peranan kerjasama pertahanan Indonesia-Korea Selatan terhadap pembangunan pertahanan di Indonesia.
- d. Bagi para pembaca, rangkaian pemikiran ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang memerlukan dan sebagai bahan perbandingan bagi penelitian sejenis, dan agar aspek-aspek yang belum terungkap dalam penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Literatur Review

Dalam sebuah karya penelitian, diantaranya karya tulis berupa skripsi, tidak ada yang bersifat mutlak asli (original) dan benar-benar baru yang dihasilkan oleh seorang penulis ataupun peneliti. Semua bentuk penelitian tersebut tidak terlepas dari pengaruh penelitian sebelumnya ataupun melakukan revisi atas penelitian sebelumnya. Begitu juga dengan penelitian ini, penulis menyadari pentingnya melakukan perbandingan (comparation) dengan penelitian ataupun tulisan-tulisan sebelumnya yang berkaitan dengan Kerjasama Pertahanan Indonesia dengan Korea Selatan.

Kali ini penulis akan mereview beberapa penelitian mengenai kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan dalam bidang pertahanan serta pengaruhnya bagi pembangunan industri persenjataan di Indonesia.

Review 1 : Eisyia Putri Adiyanti dari Universitas Hassanudin pada 2016 membahas mengenai “*Kerjasama Pertahanan Indonesia-Korea Selatan dalam Pengembangan Pertahanan*”¹⁵ penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengembangan pertahanan dalam kerjasama pertahanan Indonesia-Korea Selatan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak bagi peningkatan kekuatan pertahanan Indonesia baik dalam peningkatan Alutsista maupun yang mendukung mobilisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI)

¹⁵ “Kerjasama Pertahanan Indonesia-Korea Selatan dalam pengembangan Pertahanan”, Eisyia Putri Adiyanti, diakses dari <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/19388/BAB%20I%2C2%2C3%20SKRIPSI%20ELSYA%20PUTRI%20ADIYANTI.pdf?sequence=1> pada 24 November 2018 pada pukul 16.24 WIB

serta peningkatan bagi pendidikan dan profesionalitas TNI yang dilakukan dengan adanya Transfer of Technology (TOT) dalam kerjasama pertahanan Indonesia-Korea Selatan.

Negara yang besar harus dijaga oleh angkatan perang yang profesional, kuat, modern dan disegani, angkatan perang tersebut hanya akan terwujud jika didukung oleh Ekonomi yang kokoh sehingga mampu mendukung pembangunan postur kekuatan yang sesuai, ekonomi yang kokoh hanya akan bisa terwujud jika semua warga bangsa sadar akan pentingnya menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, kenyamanan hidup di masyarakat dengan menjauhkan diri dari segala macam urusan yang merugikan dan menyedot energi bangsa dan negara.

Kerjasama Bilateral dibidang pertahanan, teknologi, dan militer yang telah dijalin Indonesia dengan Korea Selatan berlangsung 41(empat puluh satu) tahun¹⁶ dan telah banyak memberikan keuntungan baik bagi Indonesia maupun Korea Selatan. Berbagai upaya senantiasa dilakukan agar kerjasama tersebut dapat terus ditingkatkan guna mencapai hasil yang optimal, khususnya bagi kepentingan pembangunan di Indonesia yaitu dengan memetik manfaat keunggulan Korea Selatan di bidang ekonomi, pertahanan militer, dan teknologi.

Kerjasama yang dijalin antara Indonesia dan Korea Selatan ini memberikan dampak perubahan terhadap kekuatan militer Indonesia yang ada sekarang, pada sebelumnya ketertinggalan Indonesia ini membuatnya berada pada peringkat bawah pada kekuatan militer di dunia internasional khususnya dibandingkan dengan negara tetangga di Kawasan Asia Tenggara, kini kekuatan

¹⁶ <https://www.kemlu.go.id/seoul/id/Pages/HUBUNGAN-BILATERAL.aspx>

militer Indonesia disegani oleh negara lain seperti yang pernah terjadi sebelumnya pada zaman Orde Lama.

Review 2: Referensi dari Idham Lutfhy dari Universitas Pasundan pada tahun 2017 membahas “*Kerjasama Indonesia dan Korea Selatan di Bidang Pertahanan dalam Konteks pengembangan Pesawat Tempur KFX/IFX*”¹⁷.

Dari diadakannya kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Korea Selatan khususnya dalam pengembangan Pesawat Tempur KFX/IFX memberikan dampak kemajuan bagi pertahanan di Indonesia. Kemajuan ini dirasakan sekali oleh pihak-pihak yang terjun langsung dalam peran mempertahankan kedaulatan NKRI yaitu pihak TNI

Kerjasama Indonesia-Korea Selatan bidang pertahanan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mempertahankan dan menjaga kedaulatan suatu negara atas adanya ancaman-ancaman saat ini. Dengan adanya kerjasama pertahanan tentunya memberikan keuntungan bagi kedua negara, terlebih bagi Indonesia karena melihat wilayah Indonesia yang begitu luas perlu pertahanan yang lebih kuat baik dari wilayah darat,laut,udara.

Indonesia melakukan kerjasama pertahanan dengan negara luar karena mengingat kondisi pertahanan Indonesia saat ini yang bisa dikatakan kurang baik, contohnya dari Alutsista militer Indonesia banyak yang sudah usang, dan perlunya peningkatan professional prajurit. Serta untuk meningkatkan pertahanan tentunya hal yang dibutuhkan seperti anggaran karena dengan adanya anggaran tentu Indonesia dapat menggantikan peralatan militer yang tidak layak pakai.

¹⁷ Idham Lutfhy, *Kerjasama Indonesia dan Korea Selatan di Bidang Pertahanan dalam Konteks pengembangan Pesawat Tempur KFX/IFX*. Diakses dari <http://repository.unpas.ac.id/15859/> pada 24 November 2018 pada 16.47 WIB

Penelitian ini membahas tentang upaya pemerintah untuk membangun kekuatan alutsista guna meningkatkan pertahanan negara di areal perbatasan Indonesia yang rawan konflik.

Review 3: Referensi terakhir dari Alexander Bramantio Admojo Utomo, tahun 2017 membahas “*Kontribusi Transfer Teknologi Militer Dari Korea Selatan Kepada Indonesia Melalui Penandatanganan The Joint Declaration on Strategic Partnership*”¹⁸

Menurut Alexander, pertahanan suatu negara secara militer saat ini tidak hanya mengandalkan kekuatan pasukan atau *man power* saja, namun juga mengandalkan teknologi canggih Alutsista demi menjaga kedaulatan negara. Dalam penelitian ini, Alexander menganalisa tentang proses transfer teknologi militer dalam kerjasama strategis antara Indonesia dan Korea Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan kontribusi transfer teknologi militer terhadap peningkatan kekuatan pertahanan Indonesia.

2. Kerangka Teoritis

Untuk mempermudah proses penelitian dan pembahasan, penulis mengemukakan dasar pemikiran yang diperoleh dari teori-teori atau pendapat para ahli yang mempunyai kaitan dengan objek penelitian dimana teori-teori dan konsep-konsep para ahli tersebut dapat digunakan sebagai landasan untuk menganalisa permasalahan dengan menyimpulkan hipotesis untuk memahami

¹⁸ Alexander Bramantio Admojo Utomo, Skripsi: “*Kontribusi Transfer Teknologi Militer Dari Korea Selatan Kepada Indonesia Melalui Penandatanganan The Joint Declaration on Strategic Partnership*” (Bandung:UNPAR,2017) diakses dari <http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/2243/Cover%20-%20Bab%201%20-%203312106sc-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y> pada 10 Desember 2018 pukul 16.51WIB

fenomena Hubungan Internasional, yang diharapkan hasilnya tidak jauh dari sifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Hubungan Internasional sering dianggap sebagai cabang ilmu politik, tetapi juga merupakan subjek yang dipelajari pakar sejarah (sejarah internasional atau sejarah diplomatik), dan pakar ekonomi (ekonomi internasional) HI juga merupakan bidang studi legal (Hukum Internasional publik) dan bidang filsafat (etika internasional). Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar actor yang melewati batas-batas negara. The Dictionary of World Politics mengartikan Hubungan Internasional sebagai suatu istilah yang digunakan untuk melihat suatu interaksi antara aktor-aktor negara dengan melewati batas-batas negara. Mc. Clelland mendefinisikan:

“Hubungan Internasional secara jelas sebagai studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan-kesatuan social tertentu, termasuk studi tentang keadaan. Keadaan relevan yang mengelilingi interaksi “¹⁹.

Dalam perkembangan studi Hubungan Internasional dinamika internasional tidak statis akan tetapi selalu dinamis, termasuk dalam mempelajari inter relasi antar negara satu dengan lainnya. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambahkompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar. Mochtar Mas’oed berpendapat bahwa:

“Hubungan Internasional merupakan hubungan yang sangat kompleksitas karena didalamnya terlibat bangsa-bangsa yang

¹⁹ Paul Wilkinson, *Terrorism and the Liberal State*(New York: The Macmillan Press Ltd,1997),hlm.174.

masing-masing berdaulat sehingga memerlukan mekanisme yang lebih rumit dari pada hubungan antar kelompok²⁰”

Dalam Hubungan Internasional dikenal apa yang dinamakan Kerjasama Internasional, yang mana Kerjasama Internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan negara-negara di dunia. Kerjasama Internasional, meliputi kerjasama di bidang politik, sosial, pertahanan keamanan, kebudayaan dan ekonomi, berpedoman kepada politik luar negeri masing-masing. Adapun Konsep kerjasama internasional yang dikemukakan oleh K.J. Holsti adalah:

“Kerjasama dilakukan oleh pemerintah yang saling berhubungan dengan mengajukan alternatif pemecahan, perundingan atau pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi, mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menepak pemecahan masalah tertentu dan mengakhiri perundingan dengan membentuk beberapa perjanjian atau saling pengertian yang memuaskan bagi semua pihak²¹”.

Hubungan Internasional juga mengkaji masalah Politik Luar Negeri yang dipengaruhi oleh kepentingan nasional suatu negara dan Ekonomi Politik Internasional, Politik Luar Negeri (PLN) menjembatani batas wilayah dalam negeri dan lingkungan internasional. PLN itu bisa berupa hubungan diplomatik, mengeluarkan doktrin, membuat aliansi, mencanangkan tujuan jangka panjang maupun jangka pendek (K.J Holsti, 1983:97)

²⁰ Faisal, "Pengertian Hubungan Internasional Menurut Para Ahli", dalam <https://faisal94thobhone.wordpress.com/2013/09/26/pengertian-hubungan-internasional-menurut-para-ahli/>, diakses 11 Desember 2018

²¹ K.J Holsti, *Politics International : Suatu Kerangka Analisis* (Terjemahan Drs Wawan Juanda) (Bandung: Pedoman Ilmu Jaya, 1987) hlm.650.

Jack C Plano Dan Ray Olton dalam bukunya Kamus Hubungan Internasional mengatakan bahwa Politik Luar Negeri adalah sebagai berikut:

“Strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit-politik Internasional lainnya yang dikendalikan untuk mencapai tujuan suatu bangsa lain, harus didefinisikan dalam pengertian yang cocok dengan bangsa-bangsa lain itu²²”

Hubungan bilateral dan kepentingan nasional dalam bidang pertahanan untuk mencapai keamanan nasional Indonesia merupakan salah satu konsep yang mendasari terjadinya hubungan Indonesia dan Korea Selatan. Hubungan bilateral menjadi penting bagi suatu negara, karena tidak ada negara yang dapat berdiri sendiri. Dengan adanya hubungan bilateral pencapaian tujuan suatu negara akan lebih mudah dilakukan tak satu bangsa pun di dunia ini dapat membebaskan diri dari keterlibatan dengan bangsa dan negara lain. Menurut Didi Krisna dalam kamus politik internasional mendefinisikan bahwa:

“Hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua belah pihak(dua negara)²³”.

Kerjasama pertahanan Indonesia dan Korea Selatan selain untuk memenuhi kepentingan nasional Indonesia di bidang pertahanan, kerjasama tersebut bertujuan untuk mencapai stabilitas keamanan nasional Indonesia. Keamanan nasional lebih menekankan kepada kemampuan pemerintah dalam melindungi suatu negara dari ancaman dalam maupun dari luar sehingga terpenuhinya kondisi yang aman.

²² Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 140.

²³ Didi Krisna (Ed), *Kerjasama Ekonomi Indonesia-Brasil* (Makassar: Unhas), hlm. 16.

Kerjasama pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia, diletakkan diatas prinsip-prinsip kerjasama luar negeri pemerintah Indonesia, serta diarahkan untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan sektor pertahanan negara. Lebih lanjut Arivind Dutta menjelaskan sebagai berikut:

“Defense cooperation is an ideal tool to advance the national foreign policy objectives by building bridges of friendship, preventing conflicts, building mutual trust and capacities on a global basis. The process signals the political commitment to develop cooperative relations and dispel mistrust and misperception on issues of common military interest. The evolving geo-strategic realities necessitates that policy guidelines be formulated for integrated inter-ministerial planning on issues concerning the external security of the country²⁴”

Makna dari pernyataan Arvind Dutta diatas bahwa kerjasama pertahanan merupakan salah satu jalan dalam mencapai tujuan politik luar negeri suatu negara dengan membangun kepercayaan satu sama lain.

Pertahanan Indonesia sendiri bermula pada tahun 1945, dengan potensi ancaman yang tidak ringan serta kondisi sosial,ekonomi, dan budaya yang beragam, bangsa dan negara Indonesia memerlukan kemampuan pertahanan negara yang kuat untuk menjamin tetap tegaknya kedaulatan NKRI.

Doktrin pertahanan (defence,doctrin), atau lebih luas lagi doktrin keamanan nasional (national security doctrine), meliputi berbagai prinsip dasar yang menjadi pegangan dan arahan bagi penggunaan sumber daya pertahanan untuk mencapai tujuan nasional. Strategi pertahanan dimengerti sebagai segenap seni dan pengetahuan yang berkaitan dengan pengembangan dan penggunaan unsur

²⁴ Arvind Dutta, “*Role of India’s Defense Cooperation Initiatives in Meeting the Foreign Policy Goals*”, dalam institusi pertahanan dan analisis, No.3, July2009(New Delhi:2009),hlm.1.

pertahanan, pada masa damai maupun perang, untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya dan meminimalisasi resiko. Semuanya merupakan sebuah kerangka sistematis dengan perkaitan antara konsep, strategi, dan operasionalnya.

Di Indonesia, gagasan konseptual untuk itu tertuang dalam apa yang dikenal sebagai “sistem pertahanan (dan keamanan) rakyat semesta” sishan (kam) rata, kini mulai disebut sinhanrata, dengan menghilangkan elemen keamanan di dalamnya. Menurut Sayidiman Suryohadiprojo”

“Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanrata) adalah konsep yang ditetapkan bangsa Indonesia sebagai cara menghadapi dan mengatasi serangan dan gangguan yang dilakukan negara bangsa lain terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)²⁵”.

Pelajaran yang paling jelas tentang implementasi Sishanrata adalah perjuangan kemerdekaan [periode 1945 sampai 1949. Pada masa itu, kekuatan rakyat bersenjata dan tidak bersenjata bersama-sama bangkit melawan penjajahan dan berhasil mengusir penjajah Belanda. Adapun tantangan yang dihadapi saat ini adalah mencari wujud implementasi dalam tatanan negara modern atas segenap doktrin, sistem dan tatanan yang kita warisi dari masa lalu sejak perjuangan fisik merebut kemerdekaan. Dalam kaitan Sishanrata pada hakikatnya merupakan perwujudan sistem pertahanan semesta (Total Defence) atas segenap potensi dan sumber daya nasional guna menghadapi berbagai ancaman terhadap kelangsungan hidup bangsa.

²⁵ Sayidiman Suryohadiprojo, “Sistem Pertahanan Rakyat Semesta: Hakikat Sistem Pertahanan Rakyat Semesta” dalam <http://sayidiman.suryohadiprojo.com/?p=1634>, diakses 12 Desember 2018.

Dwifungsi ABRI sebagai konsep politik ‘jalan tengah’ dari dinamika politik nasional yang berkembang dimasa lalu, bukanlah nilai yang bersumber pada jati diri TNI. Dwifungsi ABRI seharusnya ditempatkan sebagai konsep sementara yang dibutuhkan oleh bangsa untuk mengatasi keadaan yang berkembang saat itu.

“Sebagai Angkatan Perang TNI bukanlah lembaga politik sebagaimana layaknya partai politik. TNI memang harus tahu dan bahkan harus menjadikan politik sebagai wawasannya, namun politik yang dimaksud adalah politik negara. TNI dalam politik praktis tidak hanya bertentangan dengan logika demokrasi, namun justru bertentangan dengan kodrat TNI itu sendiri²⁶”

Untuk menyongsong era Indonesia baru, TNI mutlak perlu mengubah penampilannya keluar dari Dwifungsi ABRI, selanjutnya kembali ke pijakan jati diri TNI. Untuk itu reformasi internal TNI haruslah sungguh-sungguh dilaksanakan. Kesungguhan TNI dalam melaksanakan reformasi internalnya, akan menjadi tepat manakala TNI bersikukuh pada logika dan etika politik yang dilandasi oleh kejujuran, kebenaran, dan keadilan²⁷.

Pada masa kejayaan Dunia Barat, pendekatan pembangunan berdasarkan pada asumsi bahwa “modernisasi” dicirikan oleh dunia barat (negara-negara yang lebih kaya dan lebih kuat pada saat itu), yang mampu maju dari tahap awal keterbelakangan. Menurut pakar ekonomi Amerika Serikat, Walt Whitman Rostow :

²⁶ Wirahadikusumah, Agus. Indonesia Baru dan Tantangan TNI. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999. Hlm 303)

²⁷ Wirahadikusumah, Agus. Indonesia Baru dan Tantangan TNI. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999. Hlm 312)

“Ada lima tingkatan yang mempengaruhi terjadinya pertumbuhan industri: (1)Masyarakat Tradisional, (2)Masyarakat Transisi, (3)Lompatan, (4)Mendorong kematangan Teknologi, (5)Konsumsi massa yang tinggi²⁸”

Rostow dalam argumennya mengatakan bahwa loncatan ekonomi pada mulanya harus dipimpin oleh sektor ekonomi individual. Keyakinan ini menggemakan tesis milik David Ricardo mengenai keunggulan komparatif dan mengkritisi dorongan revolusioner Marx untuk kemandirian ekonomi karena mendorong pengembangan awal diantara satu atau dua sektor atas pengembangan semua sektor secara merata.

3. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mencoba membuat dan merumuskan hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai dugaan awal atau jawaban sementara terhadap permasalahan, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

“Implementasi program kerjasama pertahanan antara Indonesia-Korea Selatan, perlu reorientasi serta strategi kebijakan melalui langkah reorganisasi, rasionalisasi dalam mewujudkan profesionalisme serta modernisasi pembangunan industri sistem pertahanan Indonesia”

²⁸ 1Mallick Oliver, “Rostow’s five-stage model of development and relevance in Globalization” (Newcastle: University of Newcastle,2005)

4. Operasionalisasi Variabel dan Indikator

Untuk membantu dalam menganalisa penelitian lebih lanjut, maka penulis membuat definisi Operasional Variabel tentang konsep hipotesis, yaitu:

Tabel 2.1

Operasional Variable dan Indikator

Variabel dalam Hipotesis	Indikator	Verifikasi
Variabel Bebas: Strategi pembangunan industri sistem pertahanan Indonesia	1. Transfer Technology	<ul style="list-style-type: none"> Indonesia dan Korea Selatan Kerjasama pada pembangunan kapal selam, dan terdapat dua kesepakatan kerjasama untuk melaksanakan Pelatihan dan Produksi bersama. Dan Korea bersedia untuk memberikan teknologi pembangunan kapal selam melalui skema joint production. Serta pelatihan kepada personel dari galangan kapal dalam negeri. (sumber: https://www.researchgate.net/publication/317382302_Evaluasi_Kinerja_KKIP_Dalam_Kerjasama_Republik_Indonesia-

		<p>Korea_Selatan_Pada_Pembang unan_Kapal_Selam_Untuk_Me ndukung_Ketahanan_Alutsista_ TNI_Angkatan_Laut)</p> <ul style="list-style-type: none">• Kerjasama Indonesia Korea Selatan di bidang Pertahanan dalam konteks pengembangan pesawat tempur KFX/IFX. (sumber: Idham Luthfy, Kerjasama Indonesia dan Korea Selatan di bidang Pertahanan dalam konteks pengembangan pesawat tempur KFX/IFX. Diakses dari http://repository.unpas.ac.id/15859/ pada 15 Desember 2018 pada 10.48 WIB)• Sesko AU luluskan 108 Pamen angkatan 54 dan terdapat beberapa perwira menengah dari Korea Selatan. (sumber: https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-
--	--	---

		<p>raya/2017/11/17/seskoau-luluskan-108-pamen-angkatan-ke-54-413981)</p>
	<p>2. Misi Pertukaran Siswa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kemajuan kerjasama militer dan pertahanan kedua negara dapat dilihat dari pertukaran kunjungan perwira kedua negara termasuk pertukaran personel untuk bergabung dalam pendidikan dan pelatihan serta pengenalan sistem utama senjata dari kedua negara. (sumber: https://jakartagreater.com/perwira-sesko-militer-korea-selatan-studi-strategis-di-mabes-tni/) • Pada saat perancangan dan perekayasaan kapal selam satu dan dua itu dijadikan sarana untuk pembelajaran bagi peserta dari PT.PAL, kemudian dari kapal ketiga itu pembangunannya dalam bentuk blok-blok yang di laksanakan di

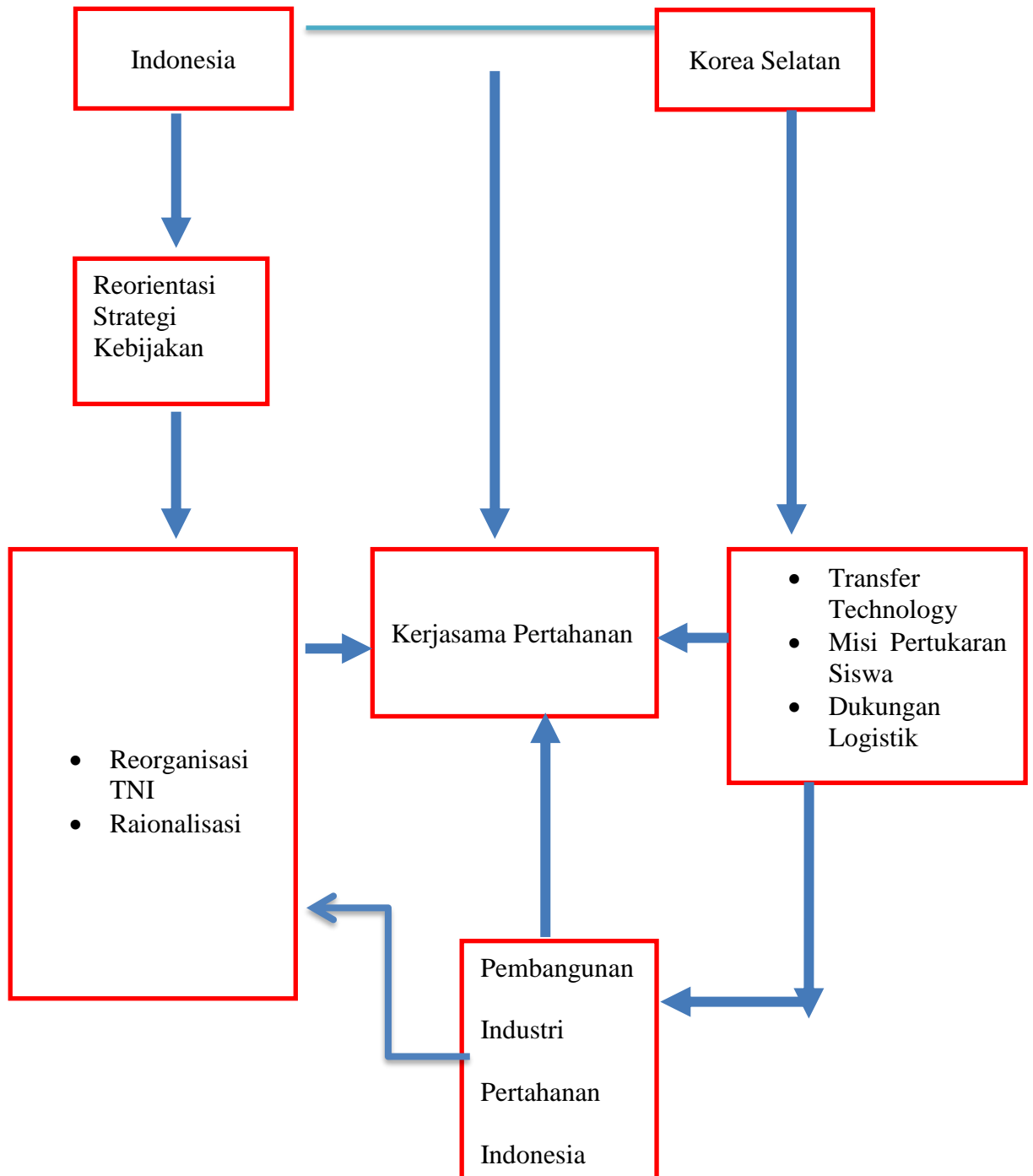
		<p>Korea tetapi teknisi-teknisi PT.PAL sudah ikut berpartisipasi, dan kemudian nanti perangkaiannya dilakukan di PT.PAL (sumber: Laksamana Pertama TNI Suryo Djati Prabowo, Ketua Project Officer Katra Laut: wawancara tanggal 7 April 2016, https://www.researchgate.net/publication/317382302_Evaluasi_Kinerja_KKIP_Dalam_Kerjasama_Republik_Indonesia-Korea_Selatan_Pada_Pembangunan_Kapal_Selam_Untuk_Mendukung_Ketahanan_Alutsista_TNI_Angkatan_Laut)</p>
	<p>3.Dukungan Logistik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Komisi I DPR RI menyetujui pergeseran anggaran program kementerian pertahanan/TNI T.A.2018 dari program peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur kemhan

		<p>yang bersumber dari Dana Rupiah Murni Pendamping (RMP) U.O. Kemhan ke program modernisasi Alutsista dan non Alutsista. Komisi I DPR RI telah menerima penjelasan kemhan/TNI yang berkaitan dengan urgensi yang menyangkut peningkatan kebutuhan anggaran Kemhan/TNI T.A. 2019. (sumber: Kesimpulan Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI,5 Sept 2018)</p>
--	--	---

<p>Variabel</p> <p>Terikat:</p> <p>Profesionalisme serta Modernisasi Pembangunan Industri sistem Pertahanan Indonesia</p>	<p>1.Rasionalisasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • RS TNI menerima masyarakat umum, itu keputusan pemerintah. Memang menjadi beban, karena ini desainnya untuk prajurit dan keluarganya tapi tiba-tiba kita tidak boleh menolak warga umum <p>(sumber: https://news.detik.com/berita/d-3415358/komisi-i-dpr-prajurit-tni-butuh-rumah-dan-tambahan-remunerasi)</p>
	<p>2.Reorganisasi TNI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sifat, watak, tabiat sebagai angkatan perang, mengharuskan setiap prajurit TNI dilandasi secara kuat oleh ketulusan membunuh/dibunuh, menghancurkan/dihancurkan musuh/lawan. Wajar saja dalam menangani urusan politik praktis menempatkan “oposisi” sebagai “lawan politik”. <p>(sumber: Wirahadikusumah,</p>

		<p>Agus. <i>Indonesia Baru dan Tantangan TNI</i>. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999. Hlm 303)</p> <p>.</p> <ul style="list-style-type: none">• Diperlukan reorganisasi TNI yang mendukung arah perubahan (termasuk dalam reorganisasi itu adalah perubahan ABRI menjadi TNI dan Polri). <p>(sumber: Wirahadikusumah, Agus. <i>Indonesia Baru dan Tantangan TNI</i>. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999. Hlm 331)</p>
--	--	---

5. Skema Kerangka Teoritis



BAB III

METODE PENELITIAN

1. Paradigma Penelitian

Penelitian pada hakekatnya merupakan suatu upaya untuk membenarkan kebenaran. Usaha untuk mengejar kebenaran dilakukan oleh para filsuf, peneliti, maupun oleh para praktisi melalui model-model tertentu. Model tersebut biasanya dikenal dengan paradigma. Paradigma dalam disiplin intelektual adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang mempengaruhinya dalam berpikir (kognitif), bersikap (afektif), dan bertingkah laku (konatif).²⁹ Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang diterapkan dalam memandang realitas dalam komunitas yang sama, khususnya dalam disiplin intelektual. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma liberalisme.

Liberalisme mempunyai beberapa pokok bahasan yang menjadi suatu pemikiran dalam menanganinya yaitu perdamaian dan keamanan, negara dan kekuasaan, institusi-institusi dan tatanan dunia, identitas dan komunitas, serta kesenjangan dan keadilan. Kedamaian dan keamanan menjadi pikiran utama dalam pandangan liberal, yang mana kaum liberal percaya perlu adanya usaha kolektif dari beberapa negara untuk menciptakan kedamaian di tengah dunia yang dipenuhi ketidakamanan. Selanjutnya liberalisme memandang kekuasaan dan negara merupakan suatu ancaman jika pemegang kekuasaan berlaku kejam dan agresif, karena dapat mengacaukan perdamaian dan hak asasi manusia. Kaum liberal juga memandang peran aktor non-negara atau institusi transnasional dapat

²⁹ Dani Vardiansyah, "*Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*" (Jakarta: Indeks, 2008) hal. 27

berpengaruh dalam hubungan internasional dan tatanan dunia. Selanjutnya kaum liberal memandang aliansi sebagai bentuk kerjasama yang dapat memenuhi kepentingan negara. Terakhir, liberalisme menitikberatkan pada suatu keadilan yang mana setiap faktor berhak memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai suatu kepentingan dan organisasi internasional diharapkan dapat menjalankan keadilan tersebut.

Liberalisme merupakan suatu paham yang memandang bentuk kerjasama antarnegara dalam hubungan internasional dapat mempersempit peluang adanya konflik, yang mana negara sebagai aktor utama memiliki tujuan untuk mencapai suatu kepentingan nasional yang di cita-citakan.

2. Tingkat Analisis

Tingkat analisis (*Level of Analysis*) dilakukan untuk mempermudah penulis dalam memilih masalah yang akan di analisa. Adapun tingkat analisis yang penulis gunakan dalam pemikiran ini dengan analisis model korelasionis dimana tingkat unit eksplanasi dan unit analisisnya sama.

Penelitian korelasi atau korelasional adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut sehingga tidak terdapat manipulasi variabel (Faenkel dan Wallen, 2008:328). Adanya hubungan dan tingkat variabel ini penting karena dengan mengetahui tingkat hubungan yang ada, peneliti akan dapat mengembangkannya sesuai dengan tujuan penelitian. Jenis penelitian ini biasanya melibatkan statistik/tingkat hubungan yang disebut dengan korelasi (McMillan dan Schumacher, dalam Syamsuddin dan Vismaia 2009;25)

3. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang di gunakan adalah metode metode kualitatif. metode kualitatif merupakan metode yang menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat sebuah permasalahan. Penelitian kualitatif adalah penelitian sebuah riset yang sifatnya deskripsi, cenderung menggunakan analisis dan lebih menampakkan proses maknanya. Tujuan dari metode ini adalah untuk memahami secara luas dan mendalam terhadap suatu masalah secara detail pada suatu permasalahan yang sedang dikaji.

4. Metode Pengumpulan Data

4.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya dan alat apa yang digunakan. Jenis sumber data adalah dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder).

4.1.1 Data Primer

Data primer adalah secara langsung diambil dari objek penelitian dari peneliti perorangan maupun organisasi atau sumber penelitian yang didapat dari sumber secara langsung dari sumber asli (tanpa perantara). Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok. Hasil observasi

terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dari hasil pengujian.

4.1.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan dengan cara atau metode baik secara komersial maupun non-komersial.

Di dalam pengumpulan data dalam rangka pembahasan laporan penelitian ini, maka peneliti memilih teknik pengumpulan data sekunder yaitu diantaranya melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan data dengan cara memanfaatkan sumber-sumber data dan informasi-informasi dari berbagai pustaka yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang akan dibahas baik yang bersifat empiris maupun teori, yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti, yang mana sumber data ini berupa buku-buku, jurnal, majalah, surat kabar, laporan-laporan serta lainnya yang dianggap relevan dengan kajian.

5. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan pada beberapa instansi/lembaga yang memiliki kepentingan dan informasi yang berhubungan dengan judul penelitian, adapun lokasi penelitiannya meliputi :

- **Perpustakaan FISIP UNPAS Jalan Lengkong Besar No. 68**

Jl. Lengkong Besar No.68 Bandung, Jawa Barat

- **Komisi I, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat. Gedung
Nusantara I

- **Perpustakaan DPR RI**

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat.

6. Jadwal dan kegiatan penelitian

o	Bulan & Minggu Kegiatan	September			October			November			Desember			January		
	Tahap Persiapan:															
	a.Konsultasi Judul															
	b.Pengajuan Judul															
	Penelitian Lapangan:															
	a.Pengurusan Surat Ijin															
	b. Kepustakaan															
	Pengolahan Data															
	Analisa Data															
	Kegiatan Akhir:															
	a. Pelaporan															
	b. Persiapan dan Draft															
	c.Persiapan Hasil Draft															
	d.Seminar Praktikum															

7. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, karya tulis ini terdiri dari 3 bab dengan beberapa sub bab. Agar mendapat arah dan gambaran yang jelas mengenai hal yang tertulis, berikut ini sistematika penulisannya secara lengkap:

BAB 1

Memuat tentang Pendahuluan yang mana terdiri dari sub-sub bab yaitu Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data, Lokasi Penelitian, Jadwal dan Kegiatan Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB 2

Berisi uraian mengenai kerangka pemikiran dan Literatur Review

BAB 3

Metode Penelitian

BAB 4

Pada bab ini lebih dikhususkan lagi bagaimana konsep kerjasama negara Republik Indonesia dan Republik Korea bagi pembangunan industri pertahanan di Indonesia . Selain itu, penulis akan menguraikan indikator-indikator penelitian serta menganalisa berdasarkan data-data yang ada.

BAB 5

Dalam bab ini akan dipaparkan beberapa kesimpulan atau hasil penelitian yang telah dilakukan, dalam bentuk ringkasan yang singkat namun masih informatif.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Implementasi program kerjasama Korea Selatan-Indonesia bagi pembangunan sistem pertahanan Indonesia

Korea Selatan adalah suatu negara yang berbentuk Republik. Negara ini memiliki Luas 99.274 km persegi lebih kecil dari Korea Utara. Korea Selatan memiliki 3000 pulau. Batas wilayah negara ini yaitu disebelah Utara berbatasan dengan RRC (Republik Rakyat Cina), selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur, barat berbatasan dengan Laut Kuning, dan Timur berbatasan dengan Laut Jepang. Dalam memenuhi kepentingan nasionalnya maka Korea Selatan melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara di dunia dengan salah satu yang dituju adalah Indonesia.

Hubungan kerjasama bilateral Indonesia dengan Korea Selatan dimulai tahun 1973 sejak diresmikannya hubungan diplomatik untuk pertama kalinya melalui pendirian Kedutaan besar di Jakarta dan Kedutaan besar di Seoul. Sejak saat itu hubungan bilateral Indonesia dengan Korea Selatan berkembang cukup erat di berbagai bidang kerjasama. Pemerintah Korea Selatan secara konsisten mendukung stabilitas, integritas wilayah dan kesatuan Negara Indonesia serta menyambut usaha-usaha.

Dalam memenuhi kepentingan nasionalnya maka Korea Selatan melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara di dunia dengan salah satu negara yang dituju adalah Indonesia.

Hubungan diplomatik yang dibangun antara Korea Selatan dengan Indonesia sejak dahulu hingga saat ini senantiasa dibimbing oleh suatu semangat itikad baik, persahabatan dan saling menghormati serta memahami. Berdasarkan prinsip diatas maka hubungan tersebut dapat berkembang bertahun-tahun.

Lima sektor yang menjadi prioritas dalam kerja sama tersebut adalah ekonomi, budaya, bidang pendidikan, riset dan teknologi, serta kerja sama pertahanan.

Sebagai sesama negara yang menganut paham demokrasi, Indonesia dan Korea Selatan membuka hubungan diplomatik untuk menjalin kerjasama. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Korea Selatan dibuka pada tahun 1973, sementara hubungan konsuler dibuka 7 tahun sebelumnya yakni pada tahun 1966. Dalam proses yang ditempuh selama masa itu, selain hubungan diplomatik, banyak juga aktivitas yang dilakukan kedua negara dalam arus saling menguntungkan. Terlebih lagi kondisi kedua negara, yang sama-sama menganut sistem demokrasi, sehingga tidak sulit jika melakukan hubungan kerjasama. Sesuai dengan sejarahnya berikut tahapan sejarah diplomatik antara Indonesia dan Korea Selatan:

1. Pada tahun 1949 merupakan pengakuan kedaulatan Korea Selatan terhadap Negara Republik Indonesia
2. Pada tahun 1966 hubungan Indonesia dan Korea Selatan terjalin ditingkat konsulat
3. Pada tahun 1973 hubungan diplomatik di tingkat duta besar terjalin.³⁰

³⁰ Sejarah Hubungan Diplomatik, 2016, <http://www.idn.mofat.go.kr/worldlanguage/asia/idn/bilateral/politik/sejarah/index.jsp>. Diakses pada 21 Februari 2017

Terkait meningkatnya aksi ancaman lintas negara yang mempengaruhi kebijakan keamanan dan pertahanan masing-masing negara, kerjasama Indonesia-Korea Selatan menempatkan hal tersebut sebagai isu keamanan bersama. Keamanan lintas negara telah sangat merugikan bagi kepentingan nasional sehingga merupakan sebuah prioritas untuk ditangani, termasuk juga di dalamnya untuk bekerja sama dengan sejumlah negara sahabat salah satunya Korea Selatan.

Dalam praktik kerjasama, bila kedua negara menjalin hubungan kerjasama maka akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Korea selatan merupakan negara maju yang terus melakukan inovasi dalam kemajuan teknologi dan informasi, sumber daya manusia, manajemen yang berkualitas, dan industri yang maju.

Indonesia sebagai negara berkembang menuju negara maju merupakan negara dengan kekayaan melimpah, pasar domestik yang besar dan strategis juga sumber daya manusia yang sedang berkembang. Namun Indonesia masih memiliki tingkat Stabilitas politik (yang relatif rendah) dan upah kerja yang tergolong rendah³¹.

Pada tahun 2006, kedua negara menandatangani "*Joint Declaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation between Republic of Indonesia and Republic of South*"³² dalam upaya meningkatkan hubungan dan

³¹ Indonesia Investment," Budaya Ekonomi – Indonesia." <http://www.indonesia-investments.com/id/budaya/ekonomi/item177> diakses pada tanggal 18 Februari 2017

³² KBRI Seoul-Hubungan Bilateral, 2014. "Hubungan Bilateral Indonesia-Korea Selatan". <http://www.kemlu.go.id/seoul/id/Pages/HUBUNGAN-BILATERAL.aspx>Diakses pada tanggal 14 Februari 2017

kerjasama baik bilateral, multilateral, maupun regional sehingga hubungan kerjasama antara kedua negara memasuki babak baru kemitraan strategis.

Dalam hal ini, kedua negara pemimpin baik Indonesia maupun Korea Selatan menyambut baik penandatanganan Persetujuan Pembentukan Komite bersama di bidang *e-Government* dan reformasi birokrasi.

Selain itu, Kerjasama Indonesia dan Korea Selatan terkait meningkatnya aksi ancaman lintas Negara telah mempengaruhi kebijakan keamanan dan pertahanan masing-masing negara yang menempatkan sebagai isu keamanan bersama. Bagi Indonesia ancaman keamanan lintas negara telah sangat merugikan kepentingan nasional sehingga merupakan suatu prioritas untuk ditangani, termasuk bekerjasama dengan sejumlah negara sahabat salah satunya Korea Selatan.

Kunjungan Presiden Korea Selatan, Lee Myung Bak menghasilkan sejumlah kerjasama dalam bentuk *Memorandum Of Understanding* (MOU) dibidang pendidikan, riset , teknologi, kehutanan, dan saelanjutnya adapula *Letter Of Intent* (LOI) dibidang pertahanan.³³Indonesia dan Korea Selatan telah menyepakati sejumlah kerjasama di berbagai sector antarlain pemberantasan korupsi, terorisme dan penanggulangan kejahatan transnasional serta pertahanan.

1. *Transfer Technology* Sebagai upaya Peningkatan Pertahanan Indonesia

Pengembangan Pesawat Tempur Korean Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (*KFX/IFX*) sebagai Implementasi Kerjasama Pertahanan Indonesia – Korea Selatan

³³DPR RI, “*Laporan Keuangan Delegasi Komisi DPR-RI ke Negara Korea Selatan* ” tanggal 26 Juli 2009” http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1_kunjungan_Kunker_Komisi_I_DPR_RI_ke_Korea_Selatan.doc Diakses tanggal 14 Maret 2017

Saat ini Indonesia dan Korea Selatan sedang menjalin kerjasama dalam pengembangan pesawat tempur yang dikenal sebagai *Korean Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (KFX-IFX)*. Pesawat tempur yang dirancang kedua negara ini sudah setara dengan jet tempur tipe F-18 Super Hornet, Eurofighter Typhoon, hingga Dassault Rafale.³⁴ Industri pesawat tempur Indonesia memandang proyek ini sebagai upaya untuk mengembangkan industri pertahanan Indonesia, khususnya Industri pesawat militernya.

Dalam kerjasama ini terdapat hal yang menarik, yaitu Indonesia hanya mengeluarkan dana sebesar 20% dari total pembiayaan *sharing cost* US\$ 8 Miliar atau 111,52 triliun rupiah. Sebelumnya Indonesia dan Korea Selatan juga menjalin kerjasama pengembangan kapal selam, dimana hal ini terkait dengan keinginan Indonesia untuk memiliki 12 unit kapal selam pada tahun 2024 mendatang. Pada tahun 2011, pemerintah Indonesia menandatangani kontrak pembelian 3 unit kapal selam DSME-209 dari Korea Selatan dengan nilai kontrak sekitar \$1.1 Miliar Kapal selam DSME-209 yang juga sering disebut *Imparoved Chanbogo* adalah varian kapal selam U-209 yang dilisensi Korea Selatan dari Jerman. Dari 3 kapal selam yang dipesan Indonesia ini, 2 unit akan dikerjakan di Korea Selatan dan 1 unit akan dikerjakan di PT. PAL Indonesia.³⁵

Dalam kerjasama ini PT. PAL Indonesia telah mengirimkan kurang lebih 100 mekanik dan Insinyur perkapalan untuk mengikuti Transfer of Technology

³⁴Finance Detik, “*Nasib Proyek Pesawat Tempur RI-Korea Selatan, JK: Kita Evaluasi.*” Diunggah pada tanggal 27 Agustus 2015 dalam <http://www.finance.detik.com/read/2015/08/27/221356/3003405/1036/nasib-proyek-pesawat-tempur-ri-korsel-jk-kita-evaluasi>. Diakses pada tanggal 14 Maret 2017

³⁵Analisis Militer, “*Modernisasi Kapal Selam Indonesia Tahun 2015-2020*” di unggah pada tanggal 19 Desember 2014 dalam http://analisismiliter.com/artikel/part/100/Modernisasi_Kapal_Selam_Indonesia_Tahun_2015_2020 diakses pada tanggal 14 Maret 2017

(TOT) melalui kerjasama tersebut Indonesia berharap dapat memberikan titik terang untuk mengembangkan kapasitas Alutista yang canggih, dan adanya transfer teknologi antara Indonesia dan Korea Selatan bagi Indonesia sehingga, pada nantinya para ahli teknologi Indonesia bisa mewujudkan keinginan kemandirian pertahanan Indonesia.

Dalam mewujudkan kemandirian pertahanannya, Indonesia sebagai negara berkembang tentunya membutuhkan adanya transfer teknologi. Dikarenakan hal tersebut yang dapat mendorong perkembangan kerjasama pertahanan Indonesia dan Korea Selatan agar terus berlanjut. Dalam kerjasama pertahanan tersebut Indonesia tidak hanya sebatas membeli tetapi Indonesia bisa mendapatkan transfer teknologi. Hal ini terbukti dengan kesuksesan Indonesia dalam membuat dua kapal perang jenis *Strategic Sealift Vessel (SSV)* yang merupakan hasil dari transfer teknologi dalam pembuatan kapal perang jenis *Landing Platform Dock (LPD)*. Dikarenakan semakin menguatnya ancaman non tradisional seperti perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, keamanan energi, migrasi internasional, dan juga terorisme internasional. Dalam menangani isu keamanan non tradisional saat ini, tidak hanya kebijakan domestik yang dibutuhkan tapi juga kebijakan luar negeri yang berperan dalam menangani isu tersebut.

Dalam perihal Stabilitas Keamanan Indonesia dan Korea Selatan melakukan kesepakatan untuk meningkatkan keamanan di Korea. Pemerintah Indonesia menegaskan dan meminta kepada Korea Utara agar mematuhi Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pentingnya peningkatan kerjasama internasional merupakan salah satu implementasi dari Kerjasama Pertahanan antara Indonesia dan Korea Selatan.

Pertukaran informasi intelejen dan kerjasama memerangi terorisme juga menjadi kesepakatan bersama antara Indonesia dan Korea Selatan. Tujuan peningkatan kerjasama internasional dalam memerangi terorisme khususnya mengenai pertukaran informasi dan intelejen dan juga mengatasi penyebab akar masalah.³⁶

2. Misi Pertukaran Siswa untuk kerjasama pertahanan Indonesia-Korea Selatan

Perwira Sesko Joint Forces Military University Republic of Korea yang dipimpin oleh Rear Admiral (L) Han Dongjin melaksanakan Studi Strategis Luar Negeri di Indonesia, salah satunya dengan mengunjungi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI).

Kedatangan Delegasi Korea Selatan yang berjumlah 18 orang diterima langsung oleh Kapuskersin TNI Laksma TNI Tatit Eko Witjaksono, S.E., M.Tr.(Han) mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo pada Kamis 30 November 2017 di Ruang Rapat Itjen TNI, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

Dalam pertemuan tersebut, Kapuskersin TNI Laksma TNI Tatit Eko Witjaksono mengatakan bahwa selama ini Indonesia dan Korea memiliki hubungan kerja sama yang baik, khususnya dalam bidang pertahanan dan militer yang telah berlangsung lama termasuk bidang pendidikan.

³⁶VOA Indonesia, “*Indonesia-Korea Selatan Sepakat Tingkatkan Keamanan di Semenanjung Korea*”, di unggah pada tanggal 17 Mei 2016 dalam <http://www.voaindonesia.com/a/indonesia-korea-selatan-keamanan-semenanjung-korea/3333589> Diakses pada tanggal 14 Maret 2017

Perwira Sesko Joint Forces Military University Republik of Korea, yang dipimpin oleh Rear Admiral (L) Han Dongjin melaksanakan Studi Strategis Luar Negeri di Indonesia, salah satunya dengan mengunjungi Mabes TNI.

Menurut Kapuskersin TNI Laksma TNI Tatit Eko Witjaksono, studi strategis luar negeri akan memberi banyak keuntungan dalam menciptakan dan mempromosikan hubungan interpersonal dan militer kedua Angkatan Bersenjata (Indonesia dan Korea).

“Kita dapat bertukar informasi mengenai ruang lingkup struktur dan tugas Angkatan Bersenjata kedua negara serta bertukar pandangan mengenai peningkatan kerja sama kedua Angkatan Bersenjata,” ujar Laksma TNI Tatit Eko Witjaksono.

Perwira Sesko Joint Forces Military University Republik of Korea, yang dipimpin oleh Rear Admiral (L) Han Dongjin melaksanakan Studi Strategis Luar Negeri di Indonesia, salah satunya dengan mengunjungi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Kapuskersin TNI Laksma TNI Tatit Eko Witjaksono menyampaikan bahwa kemajuan kerja sama militer dan pertahanan kedua negara dapat dilihat dari pertukaran kunjungan perwira kedua negara termasuk pertukaran personel untuk bergabung dalam pendidikan dan pelatihan serta pengenalan sistem utama senjata dari kedua negara.

“Kunjungan Rear Admiral (L) Han Dongjin beserta rombongan merupakan salah satu kehormatan besar bagi TNI yang diharapkan dapat mempererat kerja sama militer kedua negara,” jelas Laksma TNI Tatit Eko Witjaksono.

Sementara itu, Rear Admiral (L) Han Dongjin dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. “Hubungan kedua negara yang sudah berjalan dengan baik selama ini dapat terus diperkuat untuk kedepannya,” harap Rear Admiral (L) Han Dongjin .

Perwira Sesko Joint Forces Military University Republik of Korea, yang dipimpin oleh Rear Admiral (L) Han Dongjin melaksanakan Studi Strategis Luar Negeri di Indonesia, salah satunya dengan mengunjungi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.³⁷

Ketua Project Officer Matra Laut, Laksamana Pertama TNI Suryo Djati Prabowo menyampaikan tentang mekanisme kerjasama kapal selam sebagai berikut “Tiga unit kapal selam itu mekanismenya adalah pertama transfer of technology yaitu pada saat perancangan dan perekrutan kapal selam satu dan dua itu dijadikan sarana untuk pembelajaran bagi peserta dari PT.PAL, kemudian pada kapal selam ketiga itu pembangunannya dalam bentuk blok blok itu dilaksanakan di Korea tetapi teknisi teknisi PT.PAL sudah ikut berpartisipasi, kemudian nanti perangkaiannya dilaksanakan di PT.PAL”³⁸

Dikreg XLII Sesko TNI yang dibuka pada pertengahan Maret 2015 yang lalu tersebut diikuti oleh 150 orang Perwira Siswa (Pasis) terdiri dari Perwira Menengah (Pamen) TNI dan Polri berpangkat Kolonel, 61 Pamen dari TNI AD, 40 Pamen TNI AL, 40 Pamen TNI AU dan 2 Pamen Polri serta 7 orang Pasis dari

³⁷ <https://jakartagreater.com/perwira-sesko-militer-korea-selatan-studi-strategis-di-mabes-tni/>

³⁸ Evaluasi Kinerja KKIP dalam kerjasama Republik Indonesia dengan Republik Korea https://www.researchgate.net/publication/317382302_Evaluasi_Kinerja_KKIP_Dalam_Kerjasama_Republik_Indonesia-Korea_Selatan_Pada_Pembangunan_Kapal_Selam_Untuk_Mendukung_Ketahanan_Alutsista_TN_I_Angkatan_Laut diakses pada 1 Februari 2019

mancanegara masing-masing satu orang peserta dari Mali, Saudi Arabia, Korsel, Thailand, Singapura, Malaysia dan Australia.

3. Dukungan Logistik dalam kerjasama pertahanan Indonesia-Korea Selatan

Logistik militer adalah proses pengadaan, pemeliharaan dan transportasi dari materiil, fasilitas dan jasa. Logistik militer merupakan ilmu tentang perencanaan dan penganggaran gerakan dan pemeliharaan suatu kekuatan.³⁹ Strategi terkait dengan penentuan dan cara pencapaian logistik sesuai penciptaan dan penyelenggaraan dukungan secara terus menerus kepada satuan tempur dan satuan taktis demi tercapainya tujuan strategi. Teknis strategi dan taktik memberikan pola penyelenggaraan operasi militer, sedangkan logistik menyediakan sarannya.

Dalam ilmu militer, menjaga agar jalur suplai sambil mengganggu jalur logistik musuh amatlah krusial. Napoleon bahkan mengatakan logistik adalah faktor terpenting dalam strategi militer, karena sebuah angkatan bersenjata tanpa sumber daya dan transportasi itu tidak berdaya. Kekalahan Inggris di perang kemerdekaan Amerika dan kekalahan Poros Nazi Jerman, Italia dan Kekaisaran Jepang di medan Afrika pada Perang Dunia II semua disebabkan oleh kegagalan Logistik⁴⁰. Para pemimpin bersejarah seperti Hannibal Barca, Alexander Agung dan Duke Wellington dianggap sebagai jenius dalam logistik.

ILS (*Integrated Logistics Support*) atau dukungan logistik terpadu adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh tentara/militer untuk memastikan sistem

³⁹ Penkostrad, "*Peran Logistik Militer dalam Pertempuran*", diakses dari <https://penkostrad.wordpress.com/2011/12/15/peran-logistik-militer-dalam-pertempuran/> pada 10 Februari 2019

⁴⁰ Shiftindonesia, "*Karena Logistik Jerman kalah Perang: Studi Kasus Operasi Barbarossa*". Diakses dari <http://shiftindonesia.com/karena-logistik-jerman-kalah-perang-studi-kasus-operasi-barbarossa/> pada 10 February 2019

dukungan yang kuat dengan memberikan layanan perbekalan (logistik).⁴¹ Konsep pemikirannya adalah biaya terendah dan sesuai dengan kebutuhan, handal, persediaan yang mencukupi, pemeliharaan dan lain-lain sebagai persyaratan yang ditetapkan untuk itu.

Dalam logistik militer, perwira logistik mengatur bagaimana dan kapan memindahkan sumber daya ke tempat dimana mereka dibutuhkan. Manajemen rantai suplai di logistik militer biasanya bersinggungan dengan variabel-variabel tertentu untuk memprediksi biaya, penurunan kualitas, konsumsi dan permintaan masa depan. Pengelompokan kategori pengurutan dan kategorisasi yaitu klasifikasi suplai dikembangkan sedemikian rupa sehingga suplai dengan kategori konsumsi yang mirip dikelompokkan menjadi grup-grup tersendiri untuk kegunaan perencanaan lebih lanjut. Contohnya, konsumsi pada masa damai untuk amunisi dan bahan bakar akan lebih sedikit dibandingkan pada masa peperangan, dimana suplai lainnya seperti makanan dan baju memiliki rasio konsumsi yang konstan tanpa menghiraukan perang maupun damai. Pasukan akan selalu membutuhkan seragam dan makanan, lebih banyak pasukan berarti kebutuhan makanan dan seragam akan lebih banyak.

Prinsip-prinsip logistik militer secara umum, pertama responsif yaitu menyediakan dukungan yang tepat pada waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Kedua, kesederhanaan yaitu menghindari kerumitan dalam persiapan, perencanaan dan pelaksanaan operasi logistik. Ketiga, fleksibilitas yaitu mengadaptasi dukungan logistik terhadap setiap perubahan kondisi, baik perubahan lingkungan, perubahan misi, maupun perubahan konsep operasi.

⁴¹ Rinatnunay, “*Beberapa Tentang Logistik*”, diakses dari <https://rinatnunay.com/2013/07/02/beberapa-pengertian-tentang-logistik/> pada 10 February 2019

Keempat, ekonomis yaitu penggunaan kemampuan dukungan logistik secara efektif dan pemanfaatan yang ekonomis. Kelima, daya memperoleh dukungan logistik pokok minimum untuk memulai operasi pertempuran. Keenam, daya dukung dalam penyediaan logistik untuk jangka waktu operasi dan yang terakhir ketahanan logistik terutama infrastruktur logistik.⁴²

Dalam sistem logistik militer dikenal logistik pertahanan dan logistik wilayah. Logistik Pertahanan menekankan pada logistik sebagai jembatan antara garis depan dan garis belakang, dan proses logistik merupakan unsur ekonomi dalam operasi-operasi militer. Logistik pertahanan adalah segala upaya dalam menentukan kebijakan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian melalui tahap pembinaan dan penggunaan personel, materiel, fasilitas, dan jasa sesuai tuntutan operasional, baik dalam jumlah, mutu, waktu, jenis, tempat, dan kondisi serta dapat mempertahankan kesiapannya selama digunakan. Sedangkan logistik wilayah menekankan pada penyiapan dukungan logistik yang ditetapkan pada lokasi dan jarak dari medan-medan pertahanan dan daerah-daerah pangkal pertahanan dan perlawanan. Pembangunan pusat-pusat dukungan logistik sesuai dengan lokasi pusat pengembangan ekonomi dan industri (sesuai tata ruang wilayah negara) yang memadukan kepentingan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan.

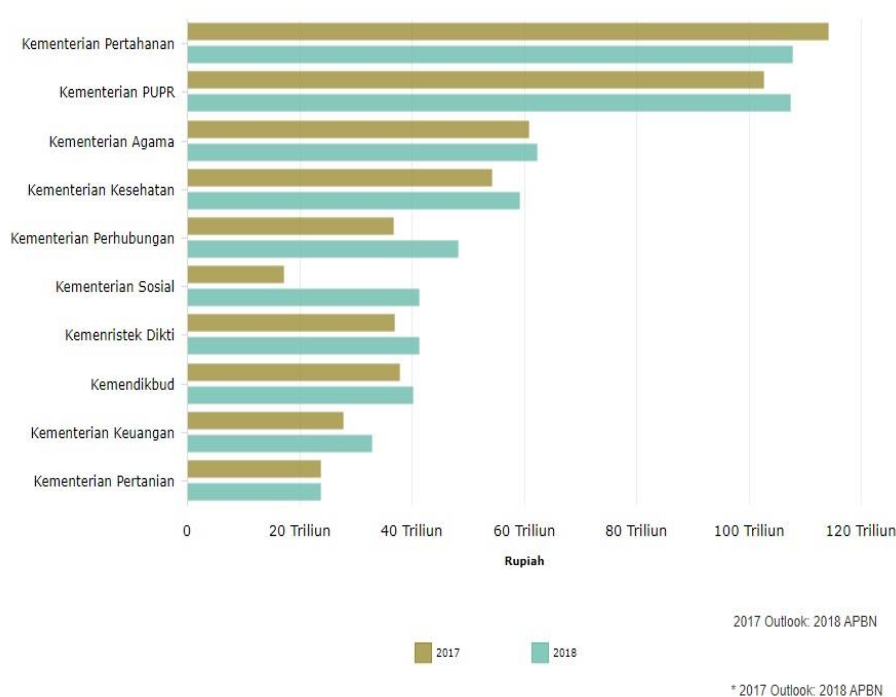
Hingga tahun 2018, pemerintahan Jokowi-JK telah membangun 214.441 rumah prajurit yang meningkat dari tahun 2015 sebanyak 209.885 rumah. Tunjangan bagi veteran juga telah ditingkatkan sebesar 25% berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2018. Ini adalah bentuk dari janji Nawacita

⁴² Logistikmiliter, “*Logistik Militer*”. Diakses dari http://logistik-militer.civil.web.id/ind/1000-884/Logistik-militer_97611_stiki-malang_logistik-militer-civil.html pada 10 February 2019

yang dijanjikan Presiden Jokowi sebagai bentuk kesejahteraan prajurit TNI serta menjadikan anggaran pertahanan sebagai prioritas.⁴³

Meskipun anggaran pertahanan mengalami penurunan dari tahun 2017, anggaran kementerian yang paling tinggi menurut Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) masih di pimpin oleh Kementerian Pertahanan.⁴⁴

10 Kementerian dengan Anggaran Terbesar dalam APBN 2018



Sumber: databoks.com

B. Strategi Pembangunan Sistem Pertahanan

Peningkatan kemampuan TNI yang masih dalam skala rendah dibandingkan negara-negara lain masih menjadi upaya pemerintah dengan mengatur segala kebijakan, strategi dan perencanaan pertahanan sudah mulai

⁴³ Sindonews.com, *Pemerintah Jokowi-JK dinilai perhatikan nasib Prajurit TNI*, diakses dari <https://nasional.sindonews.com/read/1346698/14/pemerintah-jokowi-jk-dinilai-perhatikan-nasib-prajurit-tni-1539693244> pada 8 Februari 2019

⁴⁴ Katadata.co.id, *APBN 2018:Kementerian Pertahanan Masih Menjadi Prioritas*. Diambil dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/02/07/apbn-2018-kementerian-pertahanan-masih-menjadi-prioritas> pada 5 February 2019

serius membahas kepada pembentukan *minimum essential force*. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan posisi pertahanan Indonesia setara dengan standarisasi minimal dengan negara-negara lain dikarenakan kemampuan alutsista TNI belum mencapai kebutuhan minimal.⁴⁵ Peningkatan kemampuan alutsista TNI dirpioritaskan pada perpanjangan usia pakai melalui *repowering* atau *retrofit*. Hal ini akan dilanjutkan pada tahun 2007 sebagai langkah yang strategis dalam upaya mengoptimalkan alutsista yang tersedia. Selain dikarenakan keterbatasan anggaran pemerintah, hal tersebut merupakan langkah yang lebih murah apabila dibandingkan dengan pembelian alutsista baru. Pembelian alutsista baru secara selektif hanya dilaksanakan untuk menggantikan alutsista yang sudah tidak dapat dioperasikan dan dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan teknologi pertahanan. Di samping itu, upaya modernisasi alutsista, khususnya pertahanan udara, juga dilakukan dengan memanfaatkan teknologi Rusia yang modernitasnya setingkat dengan teknologi Eropa dan Amerika Serikat. Pemanfaatan industri pertahanan dalam negeri senantiasa ditingkatkan seiring dengan meningkatnya kualitas produk peralatan militer.

Dalam mempertahankan wilayah khususnya pada masalah perbatasan, dalam amanat Undang-Undang Dasar 1945 telah disebutkan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam bela negara yang menganut sistem pertahanan negara semesta.⁴⁶ Namun, partisipasi masyarakat dalam pembangunan pertahanan belum dapat terarah dengan baik mengingat belum tersedianya peraturan

⁴⁵ Kompas.com, “Meski anggaran terbatas, TNI wajib memenuhi Minimum Essential Force”. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2016/06/22/19225331/meski.anggaran.terbatas.tni.wajib.penuhi.minimum.essential.force> pada 08 February 2019

⁴⁶ Limc4u, *Penjelasan Pasal 27 UUD 1945*, diakses dari <http://limc4u.com/uud-1945/penjelasan-pasal/penjelasan-pasal-27-uud-1945/> pada 8 Februrari 2019

perundang-undangan yang mengatur partisipasi masyarakat dalam pembangunan pertahanan. Di sisi lain, dibutuhkan biaya yang besar untuk melatih dan mendidik masyarakat sehingga siap untuk dikerahkan dalam sistem pertahanan. Oleh karena itu, peran aktif dari para tokoh masyarakat dan agama diharapkan semakin meningkat seiring dengan upaya peningkatan kegiatan bela negara bagi pemuda dan masyarakat di daerah rawan konflik dan wilayah perbatasan.

Tantangan yang dihadapi pembangunan nasional adalah bagaimana memenuhi kebutuhan alutsista TNI untuk meningkatkan kemampuan pertahanan pada tingkat *minimum essential force*. Kemandirian dengan tidak menggantungkan alutsista luar negeri atau impor sebagai bentuk kemandirian dalam menciptakan alutsista dan berupaya untuk memenuhi kebutuhan dari *minimum essential force* atas upaya dari pemerintah sendiri. Selain itu, upaya mendayagunakan potensi pertahanan negara dengan meningkatkan peran aktif masyarakat masih menghadapi beberapa kendala, khususnya kendala dari aspek legalitas dan aspek finansial.

C. Responsibilitas pembangunan Industri Pertahanan di Indonesia

Pada hakikatnya sistem pertahanan negara Indonesia adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta. Sistem pertahanan tersebut lebih dikenal dengan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata).⁴⁷ Sifat kesemestaanya dimana dalam penyelenggaraan sistem pertahanan negara didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta

⁴⁷ Pengertian menurut para ahli, "*Pengertian Sishankamrata dan Komponennya*". Diakses dari <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-sishankamrata-dan-komponennya/> pada 10 February 2019

keyakinan pada kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Fungsi pertahanan Indonesia diselenggarakan dengan sistem pertahanan semesta guna mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan segala isinya sebagai satu kesatuan pertahanan. Konsepsi pertahanan negara ini mempunyai dua fungsi, yaitu Pertahanan Militer dan Pertahanan Nirmiliter. Fungsi pertahanan militer yang diemban oleh Tentara Nasional Indonesia meliputi operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Fungsi pertahanan nirmiliter adalah pemberdayaan sumber daya nasional baik kekuatan nirmiliter maupun pertahanan sipil, yang meliputi fungsi untuk penanganan bencana alam, operasi kemanusiaan, sosial budaya, ekonomi, psikologi pertahanan yang berkaitan dengan kesadaran bela negara, dan pengembangan teknologi. Pertahanan nirmiliter dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, disebut dengan komponen cadangan dan komponen pendukung.⁴⁸

Selanjutnya, Tentara Nasional Indonesia (TNI) lahir dalam kanvas perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang berambisi untuk menjajah Indonesia kembali melalui kekerasan senjata. TNI merupakan perkembangan organisasi yang berawal dari Badan Keamanan Rakyat (BKR). Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer internasional, diubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).

⁴⁸ Academia, "Pertahanan Negara Indonesia" diakses dari https://www.academia.edu/5356056/Pertahanan_Negara_Indonesia pada 10 February 2019

Dalam perkembangan selanjutnya usaha pemerintah untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan, seraya bertempur dan berjuang untuk tegaknya kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden mengesahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI).⁴⁹

Pada saat-saat kritis selama Perang Kemerdekaan (1945-1949), TNI berhasil mewujudkan dirinya sebagai tentara rakyat, tentara revolusi, dan tentara nasional. Sebagai kekuatan yang baru lahir, disamping TNI menata dirinya, pada waktu yang bersamaan harus pula menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dari dalam negeri, TNI menghadapi rongrongan-rongrongan baik yang berdimensi politik maupun dimensi militer. Rongrongan politik bersumber dari golongan komunis yang ingin menempatkan TNI dibawah pengaruh mereka melalui Pepolit, Biro Perjuangan, dan TNI-Masyarakat.⁵⁰ Sedangkan tantangan dari dalam negeri yang berdimensi militer yaitu TNI menghadapi pergolakan bersenjata di beberapa daerah dan pemberontakan PKI di Madiun serta Darul Islam (DI) di Jawa Barat yang dapat mengancam integritas nasional.⁵¹ Tantangan dari luar negeri yaitu TNI dua kali menghadapi Agresi Militer Belanda yang memiliki organisasi dan persenjataan yang lebih modern.

Sadar akan keterbatasan TNI dalam menghadapi agresi Belanda, maka bangsa Indonesia melaksanakan Perang Rakyat Semesta dimana segenap kekuatan

⁴⁹ Kompas, "*Hari ini dalam sejarah: Latar Belakang dibentuknya TNI*" diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/05/10485361/hari-ini-dalam-sejarah-latar-belakang-dibentuknya-tni> pada 10 February 2019

⁵⁰ Academia, "*Pemberontakan PKI Madiun 1948*" diakses dari https://www.academia.edu/27365625/Pemberontakan_PKI_Madiun_1948 pada 10 February 2019

⁵¹ Ibid.

TNI dan masyarakat serta sumber daya nasional dikerahkan untuk menghadapi agresi tersebut. Dengan demikian, integritas dan eksistensi negara kesatuan republik Indonesia dapat dipertahankan oleh kekuatan TNI bersama rakyat.⁵²

Sesuai dengan keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB), pada akhir tahun 1949 dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), sejalan dengan itu, dibentuk pula Angkatan Perang RIS (APRIS) yang merupakan gabungan TNI dan KNIL dengan TNI sebagai intinya. Pada bulan Agustus 1950 RIS dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan. APRIS pun berganti nama menjadi Angkatan Perang RI (APRI).

Sistem demokrasi parlementer yang dianut pemerintah pada periode 1950-1959, mempengaruhi kehidupan TNI. Campur tangan politisi yang terlalu jauh dalam masalah intern TNI mendorong terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952 yang mengakibatkan adanya keretakan di lingkungan TNI AD. Di sisi lain, campur tangan itu mendorong TNI untuk terjun dalam kegiatan politik dengan mendirikan partai politik yaitu Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI) yang ikut sebagai kontestan dalam pemilihan Umum tahun 1955.

Periode yang juga disebut Periode Demokrasi Liberal ini diwarnai pula oleh berbagai pemberontakan dalam negeri. Pada tahun 1950 sebagian bekas anggota KNIL melancarkan pemberontakan di Bandung (pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil/APRA), di Makassar Pemberontakan Andi Azis, dan di Maluku pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS, sementara itu DI/TII Jawa Barat melebarkan pengaruhnya ke Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Aceh.

⁵² Academia, "Makalah Timbal Balik Ketahanan Nasional" diakses dari https://www.academia.edu/35122649/MAKALAH_TIMBAL_BALIK_KETAHANAN_NASIONAL pada 10 February 2019

Pada tahun 1958 Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI/Permesta) melakukan pemberontakan di sebagian besar Sumatera dan Sulawesi Utara yang membahayakan integritas nasional.⁵³ Semua pemberontakan itu dapat ditumpas oleh TNI bersama kekuatan komponen bangsa lainnya.

Upaya menyatukan organisasi angkatan perang dan Kepolisian Negara menjadi organisasi Angkatan Bersenjata Republika Indonesia (ABRI) pada tahun 1962 merupakan bagian yang penting dari sejarah TNI pada dekade tahun 60an. Menyatunya kekuatan Angkatan Bersenjata di bawah satu komando, diharapkan dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan perannya, serta tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan kelompok politik tertentu. Namun hal tersebut menghadapi berbagai tantangan, terutama dari Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai bagian dari komunisme internasional yang senantiasa gigih berupaya menanamkan pengaruhnya ke dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia termasuk ke dalam tubuh ABRI melalui penyusupan dan pembinaan khusus, serta memanfaatkan pengaruh Presiden/Panglima Tertinggi ABRI untuk kepentingan politiknya.⁵⁴

Upaya PKI makin gencar dan memuncak melalui kudeta terhadap pemerintah yang sah oleh G30S/PKI, mengakibatkan bangsa Indonesia saat itu dalam situasi yang sangat kritis. Dalam kondisi tersebut TNI berhasil mengatasi situasi kritis menggagalkan kudeta serta menumpas kekuatan pendukungnya

⁵³ Academia, "*Pemberontakan di Indonesia*". Diakses dari https://www.academia.edu/36336948/Pemberontakan_di_Indonesia pada 10 February 2019

⁵⁴ Marxist, "*Lahirnya PKI dan Perkembangannya: D.N Aidit (1955)*" diakses dari <https://www.marxists.org/indonesia/indones/1955-AiditLahirnyaPKI.htm> pada 10 February 2019

bersama-sama dengan kekuatan-kekuatan masyarakat bahkan seluruh rakyat Indonesia.

Dalam situasi sangat kacau itu, ABRI melaksanakan tugasnya sebagai kekuatan hankam dan sebagai kekuatan sospol. Sebagai alat kekuatan hankam, ABRI menumpas pemberontak PKI dan sisa-sisanya. Sebagai kekuatan sospol ABRI mendorong terciptanya tatanan politik baru untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekwn.

Sementara itu, ABRI tetap melakukan pembenahan diri dengan cara memantapkan integrasi internal. Langkah pertama adalah mengintegrasikan doktrin yang akhirnya melahirkan doktrin ABRI Catur Dharma Eka Karma (Cadek).⁵⁵ Doktrin ini berimplikasi kepada reorganisasi ABRI serta pendidikan dan latihan gabungan antara Angkatan dan Polri. Disisi lain, ABRI juga melakukan integrasi eksternal dalam bentuk kemanunggalan ABRI dengan Rakyat yang diaplikasikan melalui program ABRI Masuk Desa (AMD).

Peran, fungsi dan tugas TNI (dulu ABRI) juga mengalami perubahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor:34 Tahun 2004. TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai: penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana

⁵⁵ Housingestate, “*Ingat Program ABRI masuk desa?*” diakses dari <http://housingestate.id/read/2017/03/09/ingat-program-abri-masuk-desa-sekarang-gantinya-tmmd/> pada 10 February 2019

dimaksud di atas, dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok itu dibagi dua, yaitu: operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang.⁵⁶

Operasi militer selain perang meliputi operasi mengatasi gerakan separatis bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta, membantu tugas pemerintahan di daerah, membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang, membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia, membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan, membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search*

⁵⁶ Tni.mil, “*Peran, Fungsi, dan Tugas*” diakses dari <https://tni.mil.id/pages-2-peran-fungsi-dan-tugas.html> pada 10 February 2019

and rescue) serta membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pemajakan, perompakan dan penyeludupan.⁵⁷

Sementara dalam bidang reformasi internal, TNI sampai saat ini masih terus melaksanakan reformasi internalnya sesuai dengan tuntutan reformasi nasional. TNI tetap pada komitmennya menjaga agar reformasi internal dapat mencapai sasaran yang diinginkan dalam mewujudkan Indonesia baru yang lebih baik dimasa yang akan datang dalam bingkai tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan, sejak tahun 1998 sebenarnya secara internal TNI telah melakukan berbagai perubahan yang cukup signifikan, antara lain:

- Pertama, merumuskan paradigma baru peran ABRI abad XXI
- Kedua, merumuskan paradigma baru peran TNI yang lebih menjangkau ke masa depan, sebagai aktualisasi atas paradigma baru peran ABRI Abad XXI.
- Ketiga, pemisahan Polri dari ABRI yang telah menjadi keputusan pimpinan ABRI mulai 1-4-1999 sebagai Transformasi Awal.
- Keempat, penghapusan Kekaryaan ABRI melalui keputusan pensiun atau alih status. (Kep: 03/II/1999).
- Kelima, penghapusan Wansospolsus dan Wansospolda/Wansospolda Tk-1
- Keenam, penyusutan jumlah anggota F.TNI/Polri di DPR RI dan DPRD I dan II dalam rangka penghapusan fungsi sosial politik.

⁵⁷ Abdoel Fattah, "Demiliterisasi Tentara: Pasang Surut Politik Militer 1945-2004" diakses dari <https://tinyurl.com/y2jmhnkq> pada 10 February 2019

- Ketujuh, TNI tidak lagi terlibat dalam Politik Praktis/day to day Politics.
- Kedelapan, pemutusan hubungan organisatoris dengan partai Golkar dan mengambil jarak yang sama dengan semua parpol yang ada.
- Kesembilan, komitmen dan konsistensi netralitas TNI dalam Pemilu
- Kesepuluh, penataan hubungan TNI dengan KBT (Keluarga besar TNI)
- Kesebelas, revisi Doktrin TNI disesuaikan dengan Reformasi dan Peran ABRI abad XXI
- Keduabelas, perubahan Staf Sospol menjadi Staf Komsos
- Ketigabelas, perubahan kepala Staf Sosial Politik (Kasospol) menjadi Kepala Staf Teritorial (Kaster)
- Keempatbelas, penghapusan Sospoldam, Babinkardam, Sospolrem dan Sospoldim.
- Kelimabelas, likuidasi staf Syawan ABRI, Staf Kamtibmas ABRI dan Babinkar ABRI.
- Keenambelas, penerapan akuntabilitas public terhadap yayasan-yayasan milik TNI/Badan Usaha Militer
- Ketujuhbelas, likuidasi Organisasi Wakil Panglima TNI.
- Kedelapanbelas, penghapusan Bakorstanas dan Bakorstanasda.
- Kesembilanbelas, penegasi calon KDH dari TNI sudah harus pensiun sejak tahap penyaringan;

- Keduapuluhsatu, pencabutan materi Sospol ABRI dari kurikulum pendidikan TNI.
- Keduapuluhdua, likuidasi Organisasi Kaster TNI.
- Keduapuluh tiga, likuidasi Staf Komunikasi Sosial (Skomsos) TNI sesuai SKEP Panglima TNI No. 21/VI/2005
- Keduapuluh empat, berlakunya doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma (Tridek) menggantikan Catur Dharma Eka Karma (Cadek) sesuai Keputusan Panglima TNI nomor Kep/2/1/2007 tanggal 12 Januari 2007.⁵⁸

Sebagai alat pertahanan negara, TNI berkomitmen untuk terus melanjutkan reformasi internal TNI seiring dengan tuntutan reformasi dan keputusan politik negara.

Dalam bidang hankam terutama dalam keamanan, kepercayaan masyarakat terhadap TNI sebagai satu-satunya institusi yang bertanggung jawab terhadap bidang keamanan di Indonesia sudah sangat rendah. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa kelompok di masyarakat dengan inisiatifnya sendiri tanpa peduli terhadap legalitas hukum yang berlaku, menyatakan pembentukan institusi keamanan partikelir dengan alasan untuk mengamankan momen-momen penting negara, umpamanya keinginannya untuk ikut mengamankan sidang umum MPR.

TNI hampir selalu memberikan dukungan penuh terhadap setiap keputusan pihak eksekutif yang menyangkut sikap dan tindakannya yang mengelola negara. Ironisnya, pimpinan TNI yang memiliki wewenang komando dan pengendalian

⁵⁸ TNI, “*Reformasi Internal TNI*” diakses dari <https://tni.mil.id/view-2447-reformasi-internal-tni.html> pada 10 February 2019

selalu memutuskan mendukung eksekutif, padahal sering terjadi lembaga eksekutif keluar dari jalur yang lurus, sehingga akibatnya bangsa dan negara menghadapi situasi yang sangat berat. TNI harusnya menjadi lembaga negara yang hanya bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan nasional dan menjaga kesatuan dan persatuan. Oleh sebab itu, TNI harus segera kembali ke jati dirinya.

Dasar-dasar tanggung jawab TNI adalah melindungi kepentingan nasional, termasuk menjaga kedaulatan bangsa dan kesatuan persatuan. Masalah kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan negara, sebaiknya diserahkan kepada yang berwenang sesuai dengan tugas masing-masing dalam lingkup masyarakat (civil society).⁵⁹

Peran dwifungsi ABRI yang implementasinya tidak sesuai dengan nilai-nilai hakiki yang kenyataannya telah dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan harus segera dihapuskan. Untuk meningkatkan profesionalisme TNI, setelah dwifungsi ABRI dihapus dan diganti dengan peran TNI sesuai dengan paradigma baru TNI, segera dibarengi dengan penyusunan piranti lunak yang diperkukan. Peningkatan profesionalisme TNI ditingkatkan dengan cara meningkatkan sumber daya manusia melalui peningkatan institusi pengkajian dan pengembangan khusus dalam bidang software.

Pada dasarnya untuk dapat mengembangkan profesionalisme TNI dan meningkatkan jati diri TNI, beberapa peran TNI yang harus segera diakhiri karena telah terbukti terjadi penyimpangan/deviasi implementasi adalah: posisi TNI yang ditempatkan sebagai alat kekuasaan, keterlibatan TNI dalam politik praktis,

⁵⁹ TNI, “*Penggunaan Kekuatan TNI*” diakses dari <https://tni.mil.id/view-5371-penggunaan-kekuatan-tni.html> dari 10 February 2019

keberadaan anggota TNI di DPR/DPRD, kebijakan pada tugas karya dan hubungan emosional antara TNI dan Golkar. Dalam proses peningkatan sumber daya manusia dan penentuan calon pimpinan militer, hebdaknya lebih diutamakan kepada kemampuan intelektual, kepemimpinan militer, kemampuan, manajemen dan memiliki moral yang baik.

Kebijakan pertahanan merupakan salah satu kebijakan publik yang dimana kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan. Pertahanan negara adalah upaya untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara.⁶⁰

Pertahanan negara merupakan upaya utama untuk mewujudkan salahsatu kepentingan nasional sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sehingga dalam menyusun kebijakan pertahanan Indonesia diperlukan adanya berbagai faktor yang harus diketahui terlebih dahulu, mulai dari nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa-pancasila, niali-nilai yang tertuang UUD 1945, nilai atau falsafah perang, nilai-nilai TNI, dan berbagai nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, demikian pula harus diketahui dan dikenali kondisi kecenderungan lingkungan strategis, baik itu internal maupun eksternal negara.

⁶⁰ Academia, “*Strategi dalam Mengatasi Ancaman Militer*” diakses dari https://www.academia.edu/37819790/Strategi_dalam_Mengatasi_Ancaman_Militer pada 10 February 2019

Perkembangan lingkungan strategis senantiasa membawa perubahan terhadap kompleksitas pertahanan negara, yang dapat dilihat dari sifat, sumber, dimensi, dan spektrum ancaman. Sifat ancaman tidak didominasi oleh ancaman militer, tetapi juga oleh nonmiliter, serta tidak terbatas hanya pada ancaman tradisional tetapi juga ancaman nontradisional. Ancaman yang bersifat militer maupun nonmiliter, sebagaimana sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, harus dihadapi dengan strategi yang tepat dan dirumuskan oleh setiap kementerian/LPKN yang juga telah ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Guna menghadapi berbagai ancaman terhadap pertahanan negara yang sistematis, dengan manajemen dan kepemimpinan yang tepat, serta pengawasan yang terus-menerus.⁶¹

Kebijakan umum pertahanan negara disusun sebagai satu kesatuan arah kebijakan yang meliputi kebijakan pertahanan integratif, kebijakan pengelolaan dan penyalahgunaan sumber daya nasional, kebijakan pembangunan postur pertahanan militer, kebijakan pemberdayaan pertahanan nirmiliter, kebijakan pengerahan kekuatan pertahanan militer, kebijakan kerjasama internasional bidang pertahanan, kebijakan iptek dan industri pertahanan, kebijakan pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar kebijakan pengawasan (perpres No. 41/2010).⁶²

Kebijakan pembangunan postur pertahanan militer merupakan salah satu landasan dalam memodernisasi pertahanan Indonesia dimana fokus pengembangan postur pertahanan militer diarahkan pada Kekuatan Pokok

⁶¹ Ibid.

⁶² Kemhan, "Peraturan Presiden RI nomor 41 tahun 2010" diakses dari https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/migrasi/peraturan/perpres_no.41-2010%20ttg%20Kebijakan%20Uumum%20Pertahanan%20Negara%20th.pdf pada 10 February 2019

Minimum/Minimum Essential Force (MEF) Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan tetap mengacu pada konsep pengembangan Postur Ideal TNI yang telah direncanakan dalam jangka panjang. MEF adalah suatu standar kekuatan pokok dan minimum TNI yang mutlak disiapkan sebagai prasyarat utama serta mendasar bagi terlaksananya secara efektif tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi ancaman aktual.

1. Tantangan Pembangunan Industri Pertahanan di Indonesia

Industri pertahanan merupakan salah satu hal yang vital dalam pemenuhan kebutuhan alutsista agar mampu dioperasikan secara maksimal dalam penyelenggaraan pertahanan. Ketergantungan Indonesia akan alutsista yang diproduksi luar negeri akan menimbulkan permasalahan dan mempengaruhi kemampuan dan kesiapan TNI dalam menjalankan tugas-tugas operasional di masa yang akan datang.

Ketergantungan Indonesia akan alutsista yang diproduksi luar negeri selama ini cukup tinggi terutama di bidang teknologi pertahanan sehingga sangat sulit untuk dapat menyusun upaya pembangunan jangka panjang yang memiliki kepastian. Restriksi dan embargo merupakan faktor politik yang sangat rentan dikarenakan ketergantungan terhadap produk luar negeri. Kesiapan dan kemampuan penangkalan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan suatu permasalahan lain yang muncul. Secara politik, kondisi tersebut akan mengakibatkan Indonesia rentan terhadap tekanan politik negara lain, yang dapat berakibat pada kemungkinan terkena embargo atau pembatasan-pembatasan

terhadap peralatan tertentu yang menghambat pembangunan dan pemeliharaan alutsista.

Peralatan militer yang dimiliki Indonesia saat ini merupakan pengadaan dari luar negeri yang dimana hal tersebut menguntungkan negara produsen saja. Tidak sesuai perjanjian *transfer of technology (TOT)* dilihat hanya sebagai bentuk perjanjian di awal-awal transaksi.⁶³ Secara umum industri pertahanan Indonesia saat ini ternyata mesin dan fasilitas produksinya sudah ketinggalan zaman sehingga kapasitas produksi tidak optimal. Industri Indonesia kesulitan modal untuk melakukan modernisasi terhadap mesin/fasilitas produksi karena membutuhkan investasi yang sangat besar.

Upaya menambah alokasi anggaran pertahanan negara merupakan langkah-langkah yang dapat dilakukan negara, terutama bagi upaya modernisasi alutsista dan pengembangan industri pertahanan setiap tahunnya. Realitas kondisi negara saat ini digambarkan dengan *minimum essential force* yang menjadi tumpuan pembangunan pertahanan negara sesuai yang di tekankan oleh kebijakan Kemhan/TNI.

2. Membudayakan Militer dan Militerisasi Militer

Menurut teori hubungan sipil-militer, usaha pengendalian sipil terhadap golongan militer menurut kenyataannya dilakukan dengan dua cara, yang disebutnya: 1. *Subjective civilian control* (pengendalian sipil subyektif); 2. *Objective civilian power* atau memperbesar kekuasaan sipil dibandingkan dengan

⁶³ Jakartagreater, " *Proses Pengadaan Alutsista*" diakses dari <https://jakartagreater.com/proses-pengadaan-alutsista/> pada 10 February 2019

kekuasaan militer.⁶⁴ Tetapi soal ini tidak sesederhana nampaknya. Yang dinamakan “golongan sipil” itu bukan merupakan satu kelompok yang homogen, melainkan terdiri atas macam-macam golongan. Memperbesar kekuasaan sipil, berarti memperbesar kekuasaan golongan sipil *tertentu*. Konsepsi umum pengendalian sipil diidentikkan dengan kepentingan-kepentingan khusus satu lebih kelompok sipil.

Pengendalian sipil subyektif Dalam berbagai manifestasi sejarahnya diidentikkan dengan memperbesar kekuasaan institusi-institusi tertentu dalam suatu pemerintah, dengan memperbesar kekuasaan kelas-kelas sosial tertentu dan memperbesar kekuasaan bentuk-bentuk konstitusional tertentu. Pengendalian sipil oleh institusi tertentu pemerintah pada abad ke-17 dan 18 di Inggris dan Amerika, adalah pengendalian oleh raja. Slogan “pengendalian sipil” yang dilontarkan oleh kelompok-kelompok parlemen terhadap militer (karena raja adalah sama sipilnya dengan mereka). Jadi di sini yang diusahakan untuk dikurangi kekuasaannya bukanlah kaum militer, melainkan kekuasaan raja.⁶⁵

Pada masa sekarang di Amerika Serikat, terjadi juga perebutan wewenang yang sejenis dengan yang terjadi pada abad-abad tersebut di atas. Di sana pengendalian sipil oleh presiden ditafsirkan sebagai pengendalian oleh presiden. Sebaliknya, kongres mengidentikkan pengendalian sipil dengan pengendalian oleh kongres.

Selama perang kemerdekaan kita, terdapat hubungan yang tidak begitu serasi antara pimpinan pemerintah sipil dengan pucuk pimpinan angkatan perang.

⁶⁴ *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations*, Cambridge-Mass: 1964, hal. 80-99

⁶⁵ Farchan Bulkin, *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia*, 1988. Jakarta:LP3ES. Hal12

Dengan memakai konsep-konsep Huntington dapat kita katakan bahwa kaum sipil di dalam Negara Republik Indonesia berusaha menegakkan pengendalian sipil subyektif terhadap Angkatan Perang. Terutama di bawah Perdana Menteri Amir Sjarifuddin, proses *civilianization* yang sudah di usahakan kabinet-kabinet Sjahrir (sosialis) dilanjutkan dengan membentuk Staf Pendidikan Politik Tentara (Pepolit), Biro Perjuangan, TNI Masyarakat, dan lain-lain. Telah dididik pula sejumlah “opsir-opsir politik” yang ditempatkan pada perbagai satuan. Kiranya jelas bahwa modelnya adalah komisaris politik pada tentara merah.⁶⁶

Usaha-usaha dari Perdana Menteri Sjarifudin itu (yang kemudian ikut dalam pemberontakkan PKI di Madiun) mendapat tantangan keras, tidak hanya dari kalangan tentara sendiri. Partai-partai lain, tentunya juga ingin mempunyai pengaruh di dalam tentara, jadi bagi mereka bukan soal prinsip. Tetapi tokoh-tokoh seperti Jenderal Soedirman secara prinsipil menentang politisasi tentara. Dalam gagasan mereka telah terdapat benih-benih bagi apa yang kelak dikenal dengan sebutan Dwifungsi ABRI, yakni fungsi militer dan fungsi sosial-politik. Mereka tidak mengatakan bahwa tentara tidak boleh berpoltik, melainkan bahwa politik tentara adalah politik Negara.

3. Proses rekrutmen pembangunan pertahanan di Indonesia

Para Ahli manajemen sumber daya manusia mengatakan bahwa rekrutmen merupakan serangkaian aktivitas untuk mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian.

⁶⁶ A.H Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, III, 1977, hal. 135-138

Tulisan Yuliah Ukogi (2009) mengungkapkan bahwa, salah satu kunci utama dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional adalah terletak pada proses rekrutmen, seleksi, training and development calon tenaga kerja. Mencari tenaga kerja yang profesional dan berkualitas tidaklah mudah, hal ini merupakan sebuah kewajiban dalam sebuah organisasi dan perusahaan-perusahaan harus melakukan penyaringan untuk anggota atau para pekerja yang baru⁶⁷. Faktor yang tak dapat terelakkan dari proses rekrutmen adalah penarikan anggota keluarga (nepotisme). Kebijakan seperti ini tidak berkaitan dengan penarikan atas dasar kecakapan, tetapi berdasarkan kepentingan. Hal semacam ini bukanlah menjadi rahasia pribadi di kalangan masyarakat. Nepotisme bisa berjalan dengan baik tanpa tercium masyarakat dikarenakan adanya hubungan yang saling menguntungkan diantara dua belah pihak sehingga pihak-pihak yang terlibat akan tutup mulut untuk mengamankan dirinya sendiri.

Proses rekrutmen menjadi calon anggota TNI memang membutuhkan waktu yang cukup lama dan sangat rumit sehingga menyebabkan banyak kalangan yang kemudian melakukan jalan pintas dengan membayar sejumlah uang kepada oknum yang bertugas maupun memiliki wewenang dalam proses ini agar dapat masuk ke dunia kerja yang diinginkan⁶⁸.

TNI merupakan garda terdepan pertahanan negara sehingga merupakan komponen terpenting dalam mengamankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik

⁶⁷ Deden Efendi, "Strategi Pengembangan Industri Pertahanan dalam rangka mendukung kemandirian Alat Utama dan Sistem Senjata (Alutsista)", dalam [http://www.scribd.com/document/91471532/STRATEGI-PENGEMBANGAN-INDUSTRI-PERTAHANAN -DALAM-RANGKA-MENDUKUNG-KEMANDIRIAN-ALAT-UTAMA-DAN-SISTEM-SENJATA-ALUTSISTA](http://www.scribd.com/document/91471532/STRATEGI-PENGEMBANGAN-INDUSTRI-PERTAHANAN-DALAM-RANGKA-MENDUKUNG-KEMANDIRIAN-ALAT-UTAMA-DAN-SISTEM-SENJATA-ALUTSISTA).

⁶⁸ Novita Dwi Erdianto, "Praktik Nepotisme Perekrutan TNI". *Paradigma*, Volume 2 Nomer 1 tahun 2014 dalam <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/6559/7315>, diakses 2018.

Indonesia. Sebagai pagar betis pertahanan negara maka setiap anggota TNI merupakan pemuda-pemudi pilihan yang telah melalui berbagai tahapan seleksi yang ditentukan untuk lolos menjadi anggota TNI. Seleksi yang dilakukan dimulai dari seleksi administrasi, kesehatan, jasmani dan psikologi. Namun, pada kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa pada proses seleksi tersebut sarat dengan kecurangan. Kecurangan ini terjadi dimulai dari tingkat paling rendah hingga ke tingkat paling tinggi. Dalam proses seleksi masuk menjadi anggota TNI terjadi praktik Nepotisme antara peserta dengan oknum TNI tertentu yang dianggap mampu membantu peserta untuk lolos menjadi anggota TNI. Dalam praktik nepotisme ini mengandung empat unsur yang mempengaruhi yaitu trust atau kepercayaan, aktor yang berperan, power atau kekuasaan dan yang terakhir adalah imbalan⁶⁹.

Dalam realitas situasi politik saat ini, banyak asumsi yang mengatakan adanya praktik neopotisme dalam lembaga TNI. Adanya Hubungan Presiden Joko Widodo dengan Marsekal Hadi Tjahjanto yang sudah terjalin lama menjadikan kuatnya asumsi masyarakat terhadap praktek neopotisme. Keduanya berkenalan di Solo saat Presiden Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo dan Marsekal Hadi Tjahjanto menjabat sebagai Komandan Lanud Adi Sumarmo Solo. Marsekal Hadi Tjahjanto anak emas Presiden Jokowi Hadi Tjahjanto pertama kali dikenal publik saat menjabat sebagai direktur operasi dan latihan Basarnas pada tahun 2011-2013.

Tak berselang lama Joko Widodo dilantik sebagai Presiden atau tahun 2015, Hadi Tjahjanto masuk dalam lingkaran Istana menjadi Sekretaris Militer

⁶⁹ Ibid.

Presiden dengan status Jenderal Bintang Dua atau Marsekal Muda. Kurang dari tiga bulan Hadi Tjahjanto pun diangkat menjadi Irjen Kementerian Pertahanan⁷⁰. Menurut Janowitz, faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kesenjangan (cleavage) maupun kohesi (cohesion) di dalam lingkungan suatu angkatan bersenjata ada delapan, yakni : 1. Ethnic back-ground (suku); 2. Religious background (agama); 3. Age (usia); 4. Social background (asal-usul keturunan); 5. Educational experience (pendidikan); 6. Professional experience (pengalaman kerja profesi); 7. Ideological or political convictions (ideologi/politik); 8. Successful operational experience (sukses dalam operasi).

Ketika TNI dibentuk untuk mengintegrasikan berbagai unsur pejuang kemerdekaan yang ada, terutama untuk menyatukan pasukan-pasukan reguler dengan badan-badan perjuangan serta laskar, telah dialami berbagai kesenjangan. Dari kedelapan faktor itu yang paling menghambat usaha integrasi adalah ideological or political conviction. Terutama disebabkan karena berbagai kekuatan politik di luar tubuh TNI mencoba untuk tetap menguasai kelompok-kelompok atau individu-individu di dalam TNI untuk menjadi pionnya di dalam percaturan politik. Ini sudah disinggung dalam usaha subjective civilian control⁷¹.

D. Reorientasi serta strategi kebijakan pembangunan industri pertahanan di Indonesia

Pada hakikatnya sistem pertahanan Negara Indonesia adalah segala upaya Pertahanan bersifat semesta. Sistem pertahanan tersebut lebih dikenal dengan

⁷⁰ <http://medan.tribunnews.com/2017/12/05/marsekal-hadi-tjahjanto-anak-emas-presiden-jokowi-lihat-fakta-fakta-berikut?page=2>

⁷¹ Op. cit., 67-74

Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sinhankamrata). Sifat kesemestaannya dimana dalam penyelenggaraan sistem pertahanan negara didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.⁷²

Fungsi pertahanan Indonesia diselenggarakan dengan sistem Pertahanan Semesta guna mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan segala isinya sebagai satu kesatuan pertahanan. Konsepsi pertahanan negara ini mempunyai dua fungsi, yaitu Pertahanan Militer dan Pertahanan Nirmiliter. Fungsi pertahanan militer yang diemban oleh Tentara Nasional Indonesia meliputi operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Fungsi pertahanan Nirmiliter maupun pertahanan sipil, yang meliputi fungsi untuk penanganan bencana alam, operasi kemanusiaan, sosial budaya, ekonomi, psikologi pertahanan yang berkaitan dengan kesadaran bela negara, dan pengembangan teknologi. Pertahanan nirmiliter dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, disebut dengan komponen cadangan dan komponen pendukung.⁷³

1. Reorientasi pembangunan industri pertahanan di Indonesia

Pada 6 Februari 2017 Panja Perumahan dan Pertanahan TNI Komisi I DPR menggelar rapat bersama Kementerian Pertahanan (KEMHAN) mengenai peningkatan kesejahteraan prajurit. Menurut Dirjen Kekuatan dan Pertahanan Kemenhan Mayjen Bambang Hartawan, Rumah Prajurit yang masih kurang untuk

⁷² Idge Dewantara, "Pemahaman Dasar Sistem Pertahanan Dan Keamanan Rakyat Semesta" dalam <http://erepo.unud.ac.id/10846/3/6a4ce531791de3ffaa96a9e79a78d19c.pdf>.

⁷³ Ibid.

sekitar 264ribu untuk matra TNI. "Kita bikin dalam beberapa rencana strategis (Kekurangan rumah prajurit). Tapi masih akan kita diskusikan lagi. Kita harapannya secepatnya," ungkap Mayjen Bambang Hartawan. Hal tersebut disampaikannya usai raker Panja Perumahan dan Pertanahan TNI dengan Komisi I di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/2/2017).⁷⁴

Soal perumahan prajurit yang masih digunakan purnawirawan dan kerabatnya, Bambang berjanji pihaknya akan segera menyelesaikannya. "Kita nanti akan komunikasikan dengan mereka-mereka. DPR sudah (mendukung). Kan banyak prajurit yang nggak punya rumah, makanya disiapin," ujarnya. Sementara itu, anggota Komisi I Andreas Pareira menyebut Panja bekerja sebagai perencanaan komprehensif terkait perumahan bagi prajurit, termasuk barak-barak. Selain itu juga soal permasalahan-permasalahan soal pengalihan tanah untuk aset-aset TNI. "Dari penjelasan yang disampaikan oleh Dirjen Kuathan, itu kebutuhan dari perumahan TNI minus 170 ribuan. Prajurit kan 400 ribuan, yang siap hanya sekitar 200 ribuan. Prajurit yang purnawirawan masih tinggal juga," jelas Andreas di lokasi yang sama. "Sejak merdeka sampai sekarang kan belum pernah dibuat secara komprehensif mengenai perumahan prajurit. Kita selalu bicara prajurit kembali ke barak. Mana baraknya tidak ada. Kita harus siapkan, dulu istilahnya tangsi. Sekarang nggak ada. Sisa hanya peninggalan zaman Belanda juga sudah banyak yang alih fungsi," tambahnya. Soal perumahan bagi prajurit dan purnawiran juga sedikit dibahas dalam rapat kerja antara Komisi I dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Menhan Ryamizard Ryacudu di hari yang sama. Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon meminta

⁷⁴ Detik, "Komisi I DPR: Prajurit TNI butuh rumah dan tambahan remunerasi" diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3415358/komisi-i-dpr-prajurit-tni-butuh-rumah-dan-tambahan-remunerasi> pada 1 februari 2019 pada 18.44

komitmen dari pemerintah soal ini. "Berapa besar rumah yang diperlukan prajurit dan pos bagi mereka pasca berdinis. Dengan perbantuan dari Asabri dan tabungan sekalipun, TNI dan Kemhan tampaknya kurang jujur di sini, angka itu tidak akan terpenuhi untuk satu unit rumah," kata Effendi dalam rapat. "Sebenarnya seorang prajurit itu harus didukung saat menjadi prajurit dan kita juga harus mendukung pasca mereka berdinis. Penjelasan kemhan tadi dengan kredit 15-20 tahun dengan iuran Rp 50-100 ribu per bulan itu tidak akan pernah tercapai," sambungnya.⁷⁵

Komisi I DPR berharap agar pemerintah menyiapkan pos yang cukup signifikan dalam anggaran untuk perumahan bagi prajurit dan purnawirawan. Sebab nasib purnawirawan perlu diperhatikan meski sudah tidak lagi bertugas. "Walaupun kita memahami ketersediaan anggaran tidak mencukupi, tapi kita harus jujur berapa anggaran yang diperlukan? termasuk bagi yang sudah pensiun. Jangan seperti habis manis sepah dibuang," tutur Effendi. Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin pun turut menanggapi soal permasalahan ini. Menurutnya dalam rapat Panja disepakati perlu ada anggaran Rp 70 T untuk pembangunan perumahan bagi prajurit, namun dilakukan secara bertahap. "Untuk tamtama, bintara, perwira, butuh Rp 70 T untuk rumah prajurit. Kita diskusi akan dilakukan dalam 5 tahun dengan catatan tidak boleh mengganggu program yang sudah berjalan. Uangnya dari mana? Itu perlu didiskusikan dengan pemerintah, mungkin juga dengan kemenpera," kata TB. Selain soal perumahan bagi prajurit, Komisi I DPR juga menyoroti soal rumah sakit milik TNI yang saat ini diwajibkan untuk menerima pasien dari masyarakat umum. Anggota Komisi I Fayakhun Andriadi menyatakan pihaknya sudah memperjuangkan dana tambahan bagi rumah sakit

⁷⁵ Ibid.

TNI dari yang sebelumnya semua berada di Komisi IX. "Di banggar, kami perjuangkan Rp 750 M yang ditujukan untuk kesehatan kita pindah domainnya ke Kemenhan. Krn RS tentara di seluruh pelosok manfaatnya besar untuk publik. Mudah-mudahan tahun ini dalam APBN-P bisa lebih signifikan. Laporan dari reses, hanya 20 persen RS tentara digunakan oleh TNI dan keluarganya," paparnya.

Soal RS TNI yang diwajibkan menerima masyarakat umum, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengakuinya. Bahwa ada beban bertambah yang dirasakan oleh TNI soal hal itu. "RS TNI menerima masyarakat umum, itu keputusan pemerintah. Memang menjadi beban, karena ini desainnya untuk prajurit dan keluarganya tapi tiba-tiba kita tidak boleh menolak warga umum," aku Gatot dalam rapat. Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais usai rapat menyatakan betapa kurangnya remunerasi prajurit TNI hingga saat ini. Cukup berbeda jauh dengan pihak Polri yang personelnnya mendapat tunjangan lebih besar. "Kesejahteraan TNI dan prajurit kita sebetulnya sudah masuk dalam renstra yang disebut dalam Minimum Essential Force. Karena selain soal alutsista, juga ada soal kesejahteraan. Kami Komisi I melihat remunerasi di Prajurit TNI ini masih tidak seimbang dengan Polri," urai Hanafi. "Karena di level atau jabatan yang sama yang equal itu saja masih jauh lebih rendah di TNI. Sehingga saya pikir Kemenkeu dan Bapennas perlu menjawab soal untuk bisa merevisi soal remunerasi prajurit kita ini. Paling tidak sama dengan Polri," tambah politikus PAN itu. Hanafi menyebut, dalam perhitungan Komisi I, remunerasi ideal bagi prajurit TNI adalah 3 kali lipat dari yang diterima sekarang. Dari anggaran yang memang sudah terbatas, dia berharap pemerintah akan memprioritaskannya. "TNI

bisa punya remunerasi yang ideal, gaji termasuk tunjangannya 3 kali lipat dari yang sekarang. Yang ideal lebih tinggi (dari Polri). Bedanya (remunerasi TNI dengan Polri) Rp 1-2 juta untuk tiap tingkatan. Ini masih timpang," beber Hanafi. Komisi I disebutkan berharap Presiden Joko Widodo mau memberi perhatian serius dalam hal ini. Terutama, kata Hanafi, Jokowi pernah menjanjikan akan meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI.

2. Rasionalisasi pembangunan industri pertahanan di Indonesia

Anggaran ,Sifat, watak, dan tabiat sebagai Angkatan Perang, mengharuskan setia prajurit TNI dilandasi secara kuat oleh ketulus ikhlasan untuk membunuh atau dibunuh, menghancurkan atau dihancurkan musuh/lawan. Sifat, watak, dan tabiat yang demikian tidak mungkin begitu saja bisa dilepas dalam kehidupan keseharian setiap prajurit.

Dari uraian tersebut, maka wajar saja bila TNI dalam menangani urusan politik praktis, kemudian menempatkan pihak 'oposisi' sebagai 'lawan' politik. Sudah barang tentu dalam urusan politik TNI pun lebih cenderung hanya mengenal 'menang' karena suksesnya tugas bagi TNI adalah prinsip dasar. Padahal dalam percaturan demokrasi mitra politik maksimal ditempatkan sebagai pesaing dalam merebut dukungan rakyat. Kalah menang dalam demokrasi adalah kewajaran dan tak lebih dari kesempatan dan pergeseran dukungan/kekuasaan. Disinilah pentingnya kesadaran segenap elite bangsa untuk tidak kembali melibatkan TNI dalam politik praktis, karena dari sifat, watak, dan tabiat tersebut diatas, tidaklah mungkin TNI dapat berperilaku seperti kekuatan sosial politik sebagaimana layaknya partai politik. Bisa jadi antara TNI dan partai politik mempunyai kesamaan dalam hal tekad, semangat ataupun tujuan yang akan

diwujudkan. Namun dalam kehidupan demokrasi yang menjadi tolak ukur justru cara dan proses atau mekanisme dalam mewujudkan tujuan itu sendiri.⁷⁶

Disinilah persoalan yang mendasar mengapa TNI harus dibebaskan dari urusan politik praktis. Tuntutan dan persyaratan untuk menjadi angkatan perang yang kuat jauh berbeda dan bahkan bertentangan dengan persyaratan untuk membangun sebuah partai politik yang besar. Boleh jadi untuk tingkatan elite TNI sudah mempunyai kematangan untuk bermain politik sesuai aturan demokrasi, tapi realita prajurit bawahan di lapangan dengan tingkat pendidikan dan pengalaman tugasnya yang sangat terbatas di bidang politik tidak akan pernah bisa diajak tentang demokrasi. Bisa jadi muncul pemikiran yang terbalik, untuk menumbuh kembangkan demokrasi di dalam tubuh TNI. Namun demikian, pemikiran tersebut hendaknya dicegah sejak dini dengan sungguh-sungguh karena dipastikan pemikiran tersebut akan melemahkan sendi-sendi kehidupan TNI. Dampak lebih jauh TNI tidak akan pernah menjadi kuat, karena profesionalisme TNI tidak akan pernah terwujud. Disanalah letak arti mendasar untuk TNI segera kembali pada bidang tugas utamanya yaitu bidang pertahanan dan keamanan. Dengan demikian TNI akan segera membangun dirinya menjadi angkatan perang yang profesional, yang setiap saat siap berperang untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara.

Disinilah pluralitas masyarakat-TNI adalah bagian dari pluratisan masyarakat-harus diterima sebagai kenyataan, bukan 'ancaman'. Menerima pluralitas sebagai 'kenyataan' berarti menhidupkan partisipasi, bukan mobilisasi; mengedepankan demokratisasi, bukan anarki atau oligarki, otoritarian dan

⁷⁶ Wirahadikusumah, Agung (1999). Indonesia Baru dan Tantangan TNI. Jakarta:Pustaka Sinar Harapan

sejenisnya; memilih bahasa diplomasi, bukan senjata atau bayonet. Karena itu, konsep pertahanan keamanan yang menjadi turunannya pun harus diorientasikan bukan kepada upaya menjaga 'keutuhan' atau 'kesatuan' negara yang bersifat sangat abstrak dan cenderung pada totalitarian, melainkan kepada hidup dan kehidupan warga negara, bangsa, dan masyarakat pada umumnya.

Inilah pekerjaan besar TNI ke depan, yang tidak mungkin diselesaikan dalam waktu satu atau dua tahun. Mengapa ? Karena, hal ini mengandung implikasi sangat luas, baik secara kelembagaan maupun perilaku dan kultural. Secara kelembagaan, diperlukan reorganisasi TNI yang mendukung arah perubahan (termasuk dalam reorganisasi itu adalah perubahan ABRI menjadi TNI dan Polri). Begitu pula dengan hal perilaku, diperlukan perubahan pendidikan dan kultur untuk menciptakan prajurit yang benar-benar profesional sekaligus memiliki wawasan keindonesiaan yang kontekstual.

TNI baru memulai. Angin reformasi yang juga berhembus di markas-markas TNI boleh dibilang baru sebatas 'bahan diskusi'. Tetapi, jangan dikira ia tidak membentuk eksistensi dan reproduksi sosial di kalangan prajurit TNI. Sikap TNI yang menerima kepemimpinan sipil, dan kenetralannya pada Pemilu 1999, misalnya jelas tidak lepas dari wacana baru yang kini berhembus di lingkungan TNI. Kita memang butuh kesungguhan untuk mewacanakannya (sebagai subyek) dalam rangka meretas "Indonesia Baru", ya Indonesia yang diidealkan.

Komisi I DPR RI mengapresiasi komitmen TNI menjaga prinsip netralitas dalam dinamika perpolitikan Indonesia dan mendorong TNI untuk terus mensosialisasikan komitmen tersebut agar dilaksanakan oleh prajurit TNI hingga ke seluruh daerah.

Komisi I DPR RI dapat menerima penjelasan Kemhan/TNI yang berkaitan dengan urgensi atau hal-hal penting yang menyangkut peningkatan kebutuhan anggaran Kemhan/TNI T.A 2019 sesuai usulan kebutuhan tambahan anggaran sebesar **Rp.29.824.513.564.000,-** (*dua puluh sembilan trilyun delapan ratus dua puluh empat milyar lima ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah*). Dalam rangka optimalisasi peran serta TNI dalam penanggulangan bencana nasional, Komisi I DPR RI mendukung usulan kebutuhan anggaran kontinjensi TNI dan mendorong Kemhan/TNI agar mengajukan usulan tersebut kepada Kementerian Keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku⁷⁷.

⁷⁷ Kesimpulan Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI. Rabu, 5 September 2018

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Bila kata Reformasi sekarang ini seolah-olah menjadi simbol dari suatu masyarakat yang hidup di masa sekarang dan kehidupan dimasa mendatang yang lebih baik; maka sebaliknya masa Orde Baru yang berjalan 32 tahun dikonotasikan sebagai simbol dari masa lalu, penuh represi dan ketidakadilan. Celaknya, ikut terbawa dalam simbol demikian adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI). Meskipun itu tidak benar seluruhnya, tetapi anggapan demikian bisa dimengerti menempel amat kuat karena begitu dominannya peran serta TNI pada masa lalu.

Dengan adanya perubahan-perubahan besar pada masyarakat Indonesia semenjak berhentinya Presiden Soeharto dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998, sebetulnya TNI/ABRI pun tidak tinggal diam. TNI telah secara sukarela melakukan reformasi internal yang kemudian dirumuskan dalam Paradigma Baru TNI dalam kebijaksanaan redefinisi, dari ABRI menjadi TNI, setelah Kepolisian RI keluar dari organisasi ABRI.

Reorientasi dari ego negara kepada masyarakat serta dari sikap 'daulat tuanku' menjadi 'kedaulatan rakyat' memerlukan waktu yang tidak sebentar. Demikian pula reformasi internal TNI tidak bisa dilakukan dalam waktu sekejap, karena tidak semua sifat dan lingkungannya adalah hal-hal yang riil, sebab ada pula yang virtual sifatnya yang pasti. TNI bersama segenap komponen masyarakat lain sadar bahwa berbagai tantangan berat masih menghadang dalam perjalanan kita menuju Indonesia Baru di milenium ketiga.

Reorganisasi rasionalisasi, politik negara yang besar harus dijaga oleh angkatan perang yang profesional, kuat, modern dan disegani, angkatan perang tersebut hanya terwujud jika didukung oleh ekonomi dan strategi pembangunan sistem pertahanan yang benar sehingga mampu mendukung pembangunan postur kekuatan yang sesuai.

Terkait dengan politik luar negeri, Korea Selatan telah mempererat hubungan bilateral pertahanan dengan Indonesia semenjak tahun 2013. Kerjasama dibidang pertahanan ini berbagai upaya terus ditingkatkan guna mencapai hasil yang optimal, khususnya bagi kepentingan pembangunan industri pertahanan di Indonesia. Dengan memetik manfaat keunggulan Korea Selatan di bidang riset, pertahanan militer dan teknologi.

Hasil dari kerjasama pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia dengan Korea Selatan diantaranya, proyek produksi bersama pesawat tempur KFX/IFX dan kapal selam. Produksi ini juga melibatkan PT. Dirgantara Indonesia, PT. PAL, dan PT. PINDAD sebagai bentuk kerjasama dua belah pihak negara, demi terwujudnya pembangunan industri pertahanan Indonesia yang lebih baik .

2. Saran

Dalam merealisasikan MEF, Indonesia telah meningkatkan anggaran pertahanan Indonesia. Hal ini harus terus diperhatikan bagi pemerintah Indonesia

untuk mencapai kemandirian pertahanan Indonesia kedepannya karena mengingat anggaran pertahanan suatu negara merupakan faktor yang sangat penting dalam peningkatan kekuatan pertahanan. Selanjutnya, dalam kerjasama Indonesia dan Korea Selatan, Indonesia harus lebih memegang kendali dalam proses pembuatan Alutsista dalam setiap kerjasamanya sehingga Transfer Technology mudah untuk didapatkan oleh teknisi Indonesia. Sehingga kedepannya dapat digunakan untuk memajukan Industri Pertahanan dalam negeri Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Wan-Soon Kim & Ou-il Lee, “Korea’s FDI-LED Economic Liberalism; a Critical View”, *Asian Perspective*, Vol.32., No.1, 2008, hlm.165-192

B Heuninckx, “A Primer to Collaborative Defence Procurement in Europe; Troubles, Achievements and Prospects”, *Public Procurement Law Review*, Vol.17, No. 3, 2008, hlm. 123-145.

Bruce Newsome, *A Practical Introduction to Security and Risk Management*, (USA: SAGE Publication, 2014), hlm.3

Younghoon Choi dan Jang-Jae Lee, “Success Factors for Transferring Technology to Spin-Off Applications; in the Case of The Technology Property Rights Concession Program in Korea”, *Journal of Technology Transfer*, 25, hlm.237-246, Kluwer Academic Publisher, Netherland, 2000.

Jiho Jang, “Economic Crisis and Its Consequences”, *Social Indicator Research*. 2003, hlm.51-70.

Jahyeong Koo dan Sherrly L. Kiser, “Recovery From a Financial Crisis: The Case of South Korea”, *Economic and Financial Review*, Fourth Quarter, 2001, hlm.24-35. Andrew Tan, “East Asia’s Military Transformation; The

Revolution in Military Affairs and its Problems”, *Journal Security Challenges*, Vol.7, No.3 (Spring), 2011, hlm.77-78.

Richard A. Bitzinger, *The Modern Defense Industry: Political, Economic, and Technological Issues*, (Praeger Security International, 2009), hlm.153.

Chung-in Moon dan Jin-Young Lee, *The Revolution in Military Affairs and The Defence Industry in South Korea*, *Security Challenges*, Vol.4, No.4, Summer 2008, hlm.120-123.

Kootaneae, Akbar Javadian, et.al., “Just in Time Manufacturing: From Introduction to Implement”, *International Journal of Economics Business and Finance*, Vol.1, No.2, Maret 2013, hlm.7 – 25.

Herdi Sahrasad, *Teknokrasi Habibie dan Diaspora Teknologi IPTN di Amerika: Sebuah Kajian Pendahuluan*, (Jakarta: Media Institute dan LSAF, 2013), hlm. 72.

Jurnal

Silmy Karim, *Membangun Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia*, (Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia, 2014).

5 L.V. Kumar, 3 Juli 2006, “Defence Collaboration: Policy Implications for Singapore”, *Journal of the Singapore Armed Force*, Vol.27.

Hwan-Cho Tae, “Challenges in RnD for the Korean Aircraft Industry”, dalam Natalie Crawford & Chung-in Moon (eds), *Emerging Threats, Force Structures and the Role of Air Power in Korea*, (Santa Monica: RAND, 2000).

Richard Bitzinger, “South Korea’s Defense Industry at Crossroad”, dalam *The Korean Journal of Defense Analysis*, Vol. 7, No. 1, Summer 1995.

Jung Sik Bae, “Country Survey XVIII: The Two Koreas Defence Economy”, *Journal Defense and Peace Economics*, Vol.14, No.1, 2003.

A. David Garvin, *Managing Quality: The Strategic and Competitive Edge*, (USA: Harvard Business School, 1998).

Sumit Badhuri, “Science, Society and Technology—Three Cultures and Multiple Visions”, *Journal and Science Education and Technology*, Vol.12, No.3, September 2003.

Bhaskaranarayana, A. et.al., *Space-Based Societal Applications—Relevance in Developing Countries*, (India: Indian Space Research Organization HQ, Bangalore, 2009).

Ian Roxborough, *From Revolution to Transformation: The State of The Field & Military Transformation*, dalam *Joint Force Quarterly*, Vol.32, Autumn 2002.

Bucur-Marcu, H., et.al., Defence Management: An Introduction, (Geneva : Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces, 2009).

Internet

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180504012146-26-295573/kemhan-pastikan-proyek-pesawat-tempur-indonesia-korsel-lanjut>

Kemhan, *RI-Korsel adakan the 1st defense industry cooperation committee meeting*, diakses dari <https://www.kemhan.go.id/2012/05/22/ri-korea-adakan-the-1st-defense-industry-cooperation-committee-meeting.html> pada 4 Oktober 2018

Ihsan Iskandar, *Pertahanan dan keamanan menurut Realis*, dikutip dari power point yang di akses dari <https://www.slideshare.net/IhsanIskandar1/pertahanan-dan-keamanan-menurut-realis> pada 5 Oktober 2018 pukul 00.09 WIB

International Trade, online, <http://www.businessdictionary.com/definition/internationaltrade.html> , diakses 5 Oktober 2018 pukul 00.15 WIB

Klub Kajian Film IKJ, *Neo-Realisme Menurut Andre Bazin*, diakses dari <https://klubkajianfilmikj.wordpress.com/2009/04/30/neorealisme-menurut-andre-bazin/> pada 5 oktober 2018 pukul 01.05 WIB

Kemenkeu, *Penjelasan UUD 1945*, diakses dari <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1945/UUDTAHUN~1945UUDPenj.htm> pada 5 Oktober 2018 pukul 00.48 WIB

Hukum Online, *Perpres no. 7 tahun 2008*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28339/node/604/perpres-no-7-tahun-2008-kebijakan-umum-pertahanan-negara> pada 5 oktober 2018 pukul 1.08 WIB

Kontras, *Undang-undang Republik Indonesia*, diakses dari http://www.kontras.org/regulasi/UU_Nomor_3_Tahun_2002_tentang_Pertahanan_Negara.pdf pada 5 oktober 2018 pukul 1.16 WIB

Tirto, *PT.DI dan Kisah Jatuh Bangun Industri Pesawat Terbang Nasional*, diakses dari <https://tirto.id/pt-di-dan-kisah-jatuh-bangun-industri-pesawat-terbang-nasional-cJ3S> pada 5 Oktober 2018 pada pukul 1.19 WIB